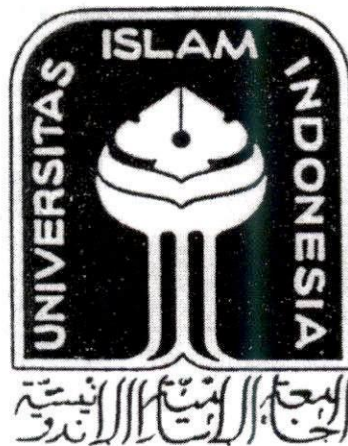


**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP WAJIB BELAJAR 9 TAHUN  
DI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL**



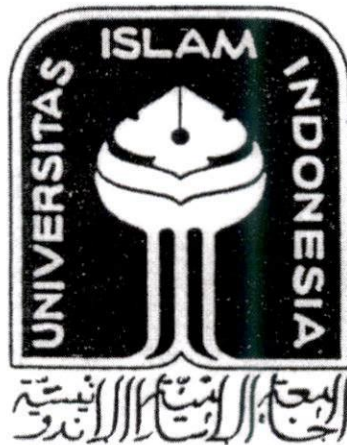
**Oleh:**  
**Khamim**  
**NIM: 10913096**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Program Pascasarjana Magister Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**  
**2012**

**ISIPASI MASYARAKAT TERHADAP WAJIB BELAJAR 9 TAHUN  
DI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL**



**Oleh:**

**Khamim**

**NIM: 10913096**

**Pembimbing:**

**Dra. Hj. Djuwarijah, M.Si.**

**TESIS**

Diajukan kepada  
Program Pascasarjana Magister Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**

**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

TESIS berjudul : Partisipasi Masyarakat Terhadap Wajib Belajar 9 tahun  
di Kecamatan Pagrbarang Kabupaten Tegal.  
Ditulis oleh : Khamim, S.Ag.  
NIM : 10913098  
Program Studi : Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Nopember 2012



Saya yang menyatakan,

Khamim, S.Ag.  
NIM. 10913098



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1075/PS-MSI/Peng./XII/2012

TESIS berjudul : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP WAJIB  
BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN PAGERBARANG  
KABUPATEN LEGAL**

Ditulis oleh : Khamim

N. I. M. : 10913096

Konsentrasi : Pendidikan Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu  
Pendidikan Islam

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, 29 Desember 2012

Ketua



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
 MAGISTER STUDI ISLAM  
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**TIM PENGUJI  
 UJIAN TESIS**

Nama : Khamim  
 Tempat/tgl.lahir : Tegal, 18 Januari 1960  
 N. I. M. : 10913096  
 Konsentrasi : Pendidikan Islam  
 Judul Tesis : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP WAJIB BELAJAR 9  
 TAHUN DI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN  
 TEGAL**

Ketua : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Pembimbing : Dra. Hj. Djuwarijah, M.Si

(.....)

Penguji : Dr. Drs. H. M. Idrus, S.Psi., M.Pd

(.....)

Penguji : Dr. Junanah, MIS

(.....)



UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2012

Pukul : 17.30–18.30 WIB

Hasil / Nilai : **80, 13 / A/B**

Mengetahui  
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1075/PS-MSI/ND/XII/2012

TESIS berjudul : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL**

Ditulis oleh : Khamim

NIM : 10913096

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

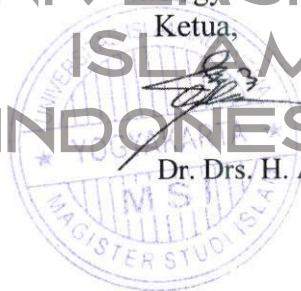


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Yogyakarta, 20 Desember 2012

Ketua,

ISLAM  
INDONESIA

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



## PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Partisipasi Masyarakat Terhadap Wajib Belajar 9 tahun  
di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.  
Ditulis oleh : Khamim, S.Ag.  
NIM : 10913098  
Program Studi : Pendidikan Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan sidang tim penguji Tesis Program  
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Mengetahui  
Ketua PPs FIAI UII

Yogyakarta, Nopember 2012

Pembimbing,

  
Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

  
Dra. Djuwarijah, MSI

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## MOTTO

□ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS.Al Mujadillah: 11).



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Istriku tercinta Sulistyaningsih.
2. Anak-anakku tersayang Arif Setiarjo, Dwi Apriliani, dan Ahmad Miladi Salas, yang selalu mendukung ayahnda dalam menyelesaikan perkuliahan ini.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahimi.*

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Terhadap Wajib Belajar 9 tahun di Kecamatan Pagrbarang Kabupaten Tegal" . Tesis ini dapat disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Megister Studi Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

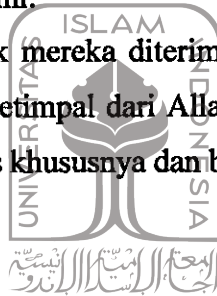
Dalam penyusunan tesis ini, tidak mungkin selesai tanpa mendapat kesempatan, bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, khususnya arahan dari dosen Pembimbing, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Drs.H Ahmad Darmadji, M.Pd. Ketua Program dan Drs. H Syarif Zubaidah, M.Ag., sekretaris Program Pendidikan Islam FIAI UII Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan saran sejak pengajuan judul tesis sampai dengan ujian Tesis ini.
4. Dr. Juwariyah,MSI, pembimbing tesis yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan tesis ini, serta memberikan motivasi yang sangat mendorong penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Segenap Guru Besar dan Dosen pada Program Pascasarja FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah mencurahkan ilmunya kepada

penulis selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana hingga selesai.

6. Civitas akademika MSI UII yang telah mempermudah dalam pengurusan berbagai persuratan untuk persyaratan yang dibutuhkan dalam penyelesaian studi ini.
7. Camat Pagerbarang beserta Staf pemerintahan yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta, khususnya rekan rekan Kelas F Tegal se-angkatan yang banyak membanti dalam bertukar informasi dalam perkuliahan ini.

Semoga semua amal baik mereka diterima sebagai bentuk amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, serta mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, Nopember 2012

Penulis

Khamim  
NIM. 10913098

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....	11
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori .....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Desain Penelitian .....	56
B. Tahap Penelitian.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data .....	57
D. Sumber Data Penelitian.....	58
E. Teknik Analisis Data .....	59

F. Teknik Pengecekan keabsahan data .....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	63
A. Hasil Penelitian .....	63
B. Pembahasan .....	108
BAB V KESIMPULAN.....	134
A. Simpulan .....	134
B. Saran-saran .....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	141



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

Hamim, Partisipasi Masyarakat Terhadap Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Tahun 2012

Tesis ini mengangkat tema tentang partisipasi masyarakat Kecamatan Pagerbarang dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun cukup responsip, Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang, Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang, dan Bagaimana sikap masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*fieldresearch*), untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian, sumber data adalah tokoh masyarakat sebanyak 5 orang, ketua komite SLTP dan MTs sebanyak 6 orang, kepala MTs dan SMP sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan oibservasi lapangan. Analisis data menggunakan trianggulasi dan 1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun berbeda beda ada yang paham dengan wajib belajar 9 tahun, cukup paham dan kurang paham, bahwa persepsi masyarakat pagerbarang terhadap wajar 9 tahun menyambut dengan baik akan kebijakan pemerintah tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang, menyekolahkan anak ke MTs / SMP, memberikan sumbangan dana kegiatan pendidikan melalui Komite sekolah guna pemenuhan sarana dan prasarana sekolah/madrasah, Memberikan bantuan dan infak melalui kegiatan Paguyuban Orang tua siswa (POS), ikatan Alumni sekolah / Madrasah, dan memberikan sumbang saran terhadap pendidikan di MTs maupun SMP. Temuan menunjukkan bahwa di Kecamatan Pagerbarang, bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah diwadahi dalam empat lembaga partisipasi, yaitu: (a) partisipasi masyarakat luas atau *stakeholders* (pengusaha, masyarakat, orang tua siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikan, politik, LSM, dan lainnya) (b) partisipasi orang tua siswa secara khusus terhimpun dalam lembaga partisipasi orang tua wali yang disebut dengan Paguyuban Orang Tua Siswa (POS). (c) partisipasi alumni. dan (d) partisipasi masyarakat dalam bentuk patnership atau kerjasama yang mendukung program MTs IPTEK, MTs Darusalam, MTs Yaspi, dan MTs Al Qudusussalam Mulyoharjo yang saling menguntungkan melalui *public relation* (humas). 3. Sikap masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang mendukung dengan baik dengan dilandasi rasa iman dan amal shaleh, karena dukungan terhadap pendidikan merupakan bentuk investasi akhirat yang membuahkan keridoan Allah swt.

Kata Kunci: Partisipasi, wajib Belajar 9 tahun

## ABSTRACT

Hamim, *Public Participation Of 9-Year Compulsory Education in Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal*. 2012

This thesis is the theme of community participation in the success Kecamatan Pagerbarang 9 years of basic education is quite responsive, models such emphasis on community capacity building in the form of empowerment masyarakat. The problem in this study is How participation on 9-year compulsory education in the Kecamatan Pagerbarang, How to shape public participation to 9-year compulsory education in the district Pagerbarang, and How attitudes towards 9-year compulsory education in the Kecamatan Pagerbarang.

This study is focused on the research field (fieldresearch), to determine the problems and to get the information and data of the research sites, data sources are public figures as many as 5 people, the committee's chairman and a junior MTs as 6 people, the head of MTs and SMP 6 people. Data collection techniques with interviews, documentation and observasi field. Analysis of data using triangulation and 1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion. The result showed that people's perception about the 9-year compulsory education is different no one familiar with the 9-year compulsory education, is quite familiar and less familiar, the public perception of the reasonable Pagerbarang 9 years will be welcomed by both government policy. Forms of public participation to 9-year compulsory education in the Kecamatan Pagerbarang, send children to MTs / SMP, donated educational activities through school committees to fulfillment infrastructures school / madrasah, Provide assistance and infak through the Parents Association (POS), Alumni ties school / Madrasah, and give false advice to the MTs and junior high school education. The findings suggest that in the District Pagerbarang, forms of community participation on school participation accommodated in four institutions, namely: (a) the participation of the public or stakeholders (employers, the community, parents, school leaders, education, politics, NGOs, and others) (b) the participation of parents in particular organized in parent participation guardian institution called the Parents' Association (POS). (C) the participation of alumni. and (d) the participation of the community in the form of patnership or collaboration that supports science and technology program MTs, MTs Darussalam, Yaspi MTs, and MTs Al Qudusussalam Mulyoharjo mutual benefit through public relations (PR). 3. Attitudes towards 9-year compulsory education in the Kecamatan Pagerbarang supports well with a sense of faith and charity based on the pious, because support for education is a form of investment that led keridoan Hereafter Allah swt.

Keywords: Participation, Learning 9-year compulsory

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.a Peta Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal.....	63
Gambar 4.b Struktur dan Hubungan Kepala Sekolah dan Komite MTs IPTEK	105
Gambar 4.c Proses Motivasi.....	128



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru, menunjukkan berakhir pula kebijakan pendidikan sentralistik, yaitu suatu kebijakan dimana pemerintah memiliki otoritas penuh di dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari manajemen pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, hingga hal yang terkecil berupa penentuan seragam sekolah, yang kemudian diganti dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada era reformasi. Reformasi merupakan era baru, era keterbukaan. Reformasi ditandai dengan dimulainya kehidupan demokrasi seluas-luasnya. Berbagai tuntutan yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat termasuk di dalamnya insan pendidikan terhadap pemerintahan baru, atas hak-hak otonominya. Hari demi hari bergulir isu otonomi, akhirnya Presiden BJ. Habibie pada tanggal 7 Mei 1999 mengeluarkan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Otonomi Daerah.

Tujuan dilimpahkannya pelaksanaan pendidikan kepada pemerintah daerah seperti tercantum dalam konsideran UU No.22/1999, adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta mendayagunakan potensi dan keanekaragaman daerah dengan tanpa mengabaikan persaingan dunia global (*global village*) (Fadjar, 2005: P.228). Ada dua macam otoritas kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertama, desentralisasi politis. Desentralisasi politis menyangkut segala kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan wewenang tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kedua, desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif menyangkut strategi pengelolaan kewenangan bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan<sup>1</sup>.

Kebijakan ini akan berdampak langsung pada pengelolaan pendidikan di daerah, baik berdampak pada perubahan kebijakan maupun persoalan anggaran. Secara nasional kebijakan tersebut akan mempengaruhi perubahan kebijakan politik nasional, baik secara institusional (kelembagaan) maupun secara managerial. Kebijakan secara institusional dimaksud adalah perubahan kebijakan yang semula dikendalikan pemerintah pusat (sentralistik) yakni UU No.2/1989 yang diturunkan dalam aturan PP No. 27, 28, 29 tahun 1990, menjadi kebijakan yang dikendalikan Pemerintah Daerah (Desentralistik) (UU No.22/1999). Melalui Undang-Undang tersebut, pendidikan diharapkan berorientasi kepada mutu, relevan dengan kondisi global dan kebutuhan daerah, dan merata pada masyarakat setempat.

Untuk menghantarkan agenda besar dari Undang Undang tersebut, maka pemerintah menerapkan MBS yang merupakan pilar pendukungnya adalah Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah/Madrasah (Komite Sekolah Dan Madrasah) sebagai kebijakan nasional. Kebijakan demi kebijakan

---

<sup>1</sup> Komnas Pendidikan, *Menuju Pendidikan Bermutu dan Merata*, Jakarta: Laporan Komisi Nasional Pendidikan 2001: hlm.31

bergulir, pada manajemen pengelolaan dan proses belajar mengajar ditandai dengan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), *link and match*, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dan pada konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah, ditandai dengan Persatuan Orang Tua Guru dan Murid (POMG), Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BPPP), Majelis Madrasah (MM), dan Komite Sekolah/Madrasah (Komite Sekolah Dan Madrasah). Namun wajah pendidikan nasional belum menunjukkan kearah perubahan bermakna. Kesan yang muncul dalam kebijakan pendidikan nasional adalah ganti menteri ganti kebijakan, dan meminjam istilahnya Tilaar "proyekisasi" kebijakan. *United Nations for Developmen Programe* (UNDP) dalam laporannya *Human Development Report* (HDR) 2004 misalnya, menempatkan Indonesia di peringkat 111 dari 177 Negara. Ia terendah dari Negara-negara tetangga, seperti Brunei (33), Singapura (25), Australia (urutan 3), Malaysia (58), Thailand (76) dan Filipina (83), indikatornya meliputi pendidikan, kependudukan, dan kesehatan pada tahun 2005, kenaikannya tidak bermakna, yaitu naik satu peringkat menjadi 110 dari 177 Negara<sup>2</sup>

Fakta menunjukkan demikian. Telah siapkah dunia pendidikan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengantisipasi era global? Untuk bersaing di pasar global, Indonesia harus mempersiapkan SDM berkompetensi agar mampu bersaing pada pasar global. Era globalisasi menurut Tilaar (1998: P.85) merupakan era terbuka dan masyarakat yang

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm

kompetitif membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang prima. SDM yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas pula. Wujud dari ini, di negara-negara maju sedang menerapkan sistem *Total Quality Manajemen* (TQM) dalam bidang pendidikan. Semua unsur dalam sistem atau organisasi bergerak secara inovatif dan produktif. Atas dasar ini, tahun 2000 Departemen Pendidikan Nasional menetapkan MBS sebagai kebijakan Nasional. Keputusan ini semua sekolah SD/MI hingga SMA/MA mesti menjadi konsep tersebut sebagai acuan (Irawan, 2004: P.24). Untuk mengawal MBS, pemerintah memperkuat pelaksanaan MBS melalui SK Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dan Undang-Undang (UU) No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan dua lembaga formal, bentukan pemerintah sebagai pilar penopang MBS<sup>3</sup>. Lembaga ini dimunculkan untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif, kemunculannya diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan formal, informal, maupun pendidikan non formal. Dan kebijakan ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia, baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah, orang tua, masyarakat dan semua *stakeholder*

---

<sup>3</sup> Ade Irawan, *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004. hlm P.45

pendidikan.<sup>4</sup> Karena masyarakat masa depan menurut Tilaar adalah “masyarakat madani, masyarakat yang memiliki otonomi, dan menonjolnya peran swasta dalam pembangunan. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan merupakan hal yang mutlak. Proses ini kemudian dikenal dengan *grass root planning*<sup>5</sup>

Keberadaan lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Sekolah patut dipertanyakan karena tidak jelas arah dan misinya. Tampaknya Komite Sekolah cenderung diarahkan untuk mendorong privatisasi sekolah ketimbang untuk menghidupkan demokratisasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah sebagaimana amanah Kepmendiknas No.044/U/2002, bahwa komite hendak dijadikan agen demokratisasi dan akuntabilitas. Namun, pada kenyataannya Departemen Pendidikan Nasional mengakui bahwa komite lebih berperan sebagai agen privatisasi (Ade Irawan et.all, 2006: P.45). Winarno Surachmad yang diwawancarai tim ICW (2006: P.74) menyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan hanya sebatas *political will*, tapi tidak sampai pada *political action*. Hal ini terbukti dari berbagai temuan menunjukkan penerapan konsep MBS dengan dua pilar DP dan Komite Sekolah Dan Madrasah belum bisa memberi gambaran yang jelas tentang wajah pendidikan nasional. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Sekolah Dan Madrasah, telah lama diterapkan dan berkembang di negara-negara maju,

---

<sup>4</sup> Dirjen Dikdasmen, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002. hlm 1

<sup>5</sup> Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Cetakan Pertama, Terra Indonesia, Jakarta, 1998. hlm 274

seperti: Amerika. Bahkan Kamboja, negara tetangga Indonesia beberapa tahun sebelumnya telah menerapkan MBS (Irawan,2004: P.57-58). Di Indonesia tercatat sebelum tahun 1970-an, pada saat itu telah ada wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk ikatan atau organisasi yaitu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), selanjutnya pada tahun 1974 Organisasi ini dibubarkan dan diganti dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) (Depdikbud, tanpa tahun: P.123). Terus bagaimana dengan madrasah? Menurut Muhaimin (2006: P.180), bahwa dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Muslim itu sendiri. Madrasah sebenarnya sudah menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Karena substansi MBS adalah sekolah memiliki otoritas penuh untuk mengelola sekolah dengan mendapatkan partisipasi luas dari masyarakat. Dan sekolah kemudian menjadi milik masyarakat. Bentuk partisipasi seperti ini sudah dialami oleh sekolah-sekolah di Indonesia terutama sekolah-sekolah berbasis Agama. Pada sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah, pondok pesantren, sekolah-sekolah Muhammdiyah dan sekolah-sekolah berbasis agama lainnya. Keberadaan sekolah sekolah tersebut karena dukungan atau partisipasi masyarakat baik pemikiran, tenaga, dan materi secara optimal. Sehingga sangat wajar dikatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat terhadap madrasah seiring dengan keberadaan Islam itu sendiri. Indikator ini ditunjukkan dengan lebih besarnya sekolah yang dibangun atas inisiatif masyarakat dari sekolah yang dibangun pemerintah. Sebagaimana diungkap oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Muhammad

Ali bahwa hingga saat ini 91,5 persen madrasah berstatus swasta. Hal senada disampaikan oleh Tilaar, bahwa konsep MBS dengan mengembalikan sekolah pada pemilik aslinya yaitu masyarakat bukan hal yang baru. Awal mulanya sekolah-sekolah di Indonesia adalah sekolah yang dibangun oleh masyarakat dan sejak Islam muncul di Indonesia. Dan sekolah sekolah ini masih bertahan hingga saat ini. Jumlahnya pun lebih besar dari sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah.

Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal jumlah MI sebanyak 5 sebanyak 7 buah, MTs sebanyak 4 buah, dan MAN sebanyak 1 buah (Asalnya MA Darul Ulum di negerikan Tahun 1997), adapun untuk SD sebanyak 35 buah, SMP Negeri sebanyak 2 buah dan SMA sebanyak 1 buah, hal ini telah memberikan bukti bahwa peran serta masyarakat secara sadar dan aktif dengan penuh pengorbanan akan memberikan perubahan besar terhadap pendidikan.

Peran tokoh agama dan pemuka masyarakat adalah sosok yang telah meletakkan dasar-dasar berpartisipasi terhadap madrasah. Kerja keras, kerja ikhlas, dan rela berkorban adalah bentuk konkrit partisipasi mereka terhadap madrasah. Hal ini kemudian mendorong pertanyaan, kenapa ditempat lain partisipasi masyarakat terhadap madrasah tinggi tapi kualitasnya rendah?

Masyarakat Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal telah menempatkan peran serta dalam program wajar 9 tahun sejak dicanangkankannya program ini. Namun demikian sebagian masyarakat menganggap program ini merupakan program pemerintah belum menyentuh pada masyarakat bawah (miskin). Dari data Dukumen Laporan SD/MI tentang

siswa melanjutkan Tahun 2011 diketahui lulusan SD/MI sebanyak 1543 siswa yang melanjutkan sekolah ke SMP/MTS sebanyak 1429 siswa.

Dalam hal partisipasi masyarakat Kecamatan Pagerbarang dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun cukup responsip, dimana lembaga pendidikan swasta MTS sejak dicanangkannya pendidikan dasar 9 tahun semua MTs hanya 1 buah kemudian sekarang menjadi 4 buah MTs yang berusaha menampung lulusan SD dan MI agar dapat bersekolah minimal SLTP. Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. Padahal sebelum dicanangkannya Wajar 9 tahun

---

<sup>6</sup> Sumodiningrat, *Buruk Wajah Pendidikan Dasar: Riset Kepuasan Warga Atas Pelayanan Pendidikan Dasar* di Jakarta, Garut, dan Solo, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2006, hlm 223

pemerintah telah mendirikan SMP Negeri sebanyak 2 buah, namun setelah dicanangkannya wajar 9 tahun jumlah SMP tidak bertambah. Justru yang bertambah adalah lembaga pendidikan swasta seperti MTS. Berdirinya MTs ini apakah merupakan bentuk pemahaman masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun ataukah hanya sebagai bentuk respon sebagian tokoh masyarakat terhadap pentingnya pendidikan Islam di Kecamatan Pagerbarang? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dirumuskan dalam judul tesis: Partisipasi Masyarakat Terhadap Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang?
2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui partisipasi masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang.
2. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang.

3. Mengetahui sikap masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian dan pengembangan pendidikan Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk memperkuat teori ilmu pendidikan yang menyatakan bahwa keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun tidak lepas dari dukungan partisipasi masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya..

- c. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai informasi awal sebelum melaksanakan penelitian sejenis dan variabel yang berbeda atau kajian yang berbeda dalam variabel yang sama.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas masalah kebijakankebijakan pendidikan nasional yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, dimulai dari tesis tentang Inovasi Madrasah, Studi Kasus di MAN Malang 3, tahun 2002, di PPS UMM. Dalam kajian ini, Sri Istuti Mamik juga mengungkap tentang pentingnya peran Komite Sekolah/Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional<sup>1</sup>. Namun ruang lingkup kajiannya tidak secara spesifik dan mendalam membahas masalah peran, fungsi, dan tugas Komite Sekolah/Madrasah. Titik sentral pembahasannya lebih ditekankan pada aspek inovasi kurikulum. Adapun pembahasan mengenai Komite Sekolah/Madrasah, hasil penelitiannya lebih pada menggambarkan secara umum pentingnya peran Komite Sekolah/Madrasah. Hal ini bisa dilihat dari rekomendasi dan saran-saran: (1) Majelis Madrasah diperlukan sebagai mitra kepala sekolah dalam peningkatan mutu; (2) perlu ada pembagian tugas antara Majelis Madrasah dengan sekolah dan mensosialisasikan inovasi yang sudah dirancang bersama kepala sekolah; (3) lima tugas Majelis Madrasah: menetapkan rencana anggaran, menetapkan rencana pembelajaran, memberi

---

<sup>1</sup> Sri Astuti Mamik, *Peran Komite Sekolah/Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, Studi Kasus di MAN Malang 3, tahun 2002*, Tesis PPS UMM, hlm 167.

saran kepada pihak madrasah, supervisi dan evaluasi dan merekomendasikan calon kepala sekolah.

Kedua, tesis tentang Implementasi Program MBS di MI Raudatul Ulum Kebondalem Mojosari Mojokerto, oleh Muhammad Qoyum, Mahasiswa UMM pada tahun 2002, dengan hasil temuan menunjukkan bahwa, “pelaksanaan MBS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di MI Raudatul Ulum Kebondalem Mojosari Mojokerto”. Secara teoritis konsep MBS merupakan konsep yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, namun dalam implementasinya dibutuhkan kreatifitas, inovasi, dan seni kepemimpinan dan manajerial dari kepala sekolah untuk mampu mendorong segenap *stakeholders* untuk bersama-sama mengelola sekolah.<sup>2</sup>

Ketiga, tesis tentang Studi Kinerja Komite Sekolah/Madrasah di MTs.N Blitar Tahun 2003, di PPS UMM. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah/Madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kinerja Komite Sekolah/Madrasah sangat baik karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (a) pengurus Komite Sekolah/Madrasah sebagian besar anggota DPR; (b) pengurus Komite Sekolah/Madrasah sudah saling mengenal dengan kepala sekolah; dan (c) memiliki kesamaan visi dan pandangan.

---

<sup>2</sup> Mohamad Qoyum, Implementasi Program MBS di MI Raudatul Ulum Kebondalem Mojosari Mojokerto, (malang: UMM, 2010), hlm 132.

Namun demikian hasil temuan ini masih belum memuaskan. Mengingat Komite Sekolah/Madrasah hanya difungsikan sebagai “cap stempel” setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama untuk menarik dana dari orang tua murid. Sementara dari rumusan tujuan dibentuknya Komite Sekolah/Madrasah sangat jelas tercantum bahwa lembaga ini bukan sebagai “juru tagih”, tetapi wadah bagi orang tua murid dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan untuk bersama-sama dengan kepala sekolah dan guru mengurus tata kelola sekolah. Komite Sekolah/Madrasah merupakan representasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah serta mendorong partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keuangan sekolah. Dengan kata lain, Komite Sekolah/Madrasah mencerminkan kepentingan sekaligus tanggung jawab *stakeholders* pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Sebagaimana dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah/Madrasah merupakan “BP3 dengan paradigma baru”, sementara menurut hemat peneliti terdapat perbedaan yang sangat substantif antara BP3 dengan Komite Sekolah/Madrasah, baik peran, fungsi dan tugas. Karena pada BP3 satuan pendidikan yang pro aktif, sementara Komite Sekolah/Madrasah dalam konteks ini lebih berperan aktif terutama dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugas pokoknya. Di samping itu, pada saat penelitian dilakukan indikator kinerja Komite Sekolah/Madrasah belum ada petunjuk dari Mendiknas. Hal ini dapat dipahami mengingat *pertama*, sistem birokrasi yang berlaku di Indonesia dan *kedua*, pada tahun pertama dan kedua setelah pengesahan UU Sisdiknas No.20/2003 baru pada

tahap sosialisasi pembentukan. Sehingga penelitian yang dilakukan berkisar antara tahun 2003-2004 tentang Komite Sekolah/Madrasah fokus kajiannya lebih pada aspek respon masyarakat dan satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah tentang UU Sisdiknas No.20/2003 dan bukan pada aspek kinerja, aspek pengaruh, aspek hasil peran Komite Sekolah/Madrasah. Meskipun kajian dalam tesisnya, masuk pada rencana kinerja dengan menganalisis aspek manajemen, namun menurut hemat peneliti, ini belum memuaskan melihat makna manajemen secara keseluruhan. Hal ini diungkap sendiri oleh Ahmad Fauzi, bahwa analisis kajian terfokus pada masukan, proses, dan keluar. Sementara unsur-unsur manajemen Komite Sekolah/Madrasah seperti hasil, manfaat, dan dampak belum dibahas dengan pertimbangan usia Komite Sekolah/Madrasah pada objek studi baru jalan satu tahun.<sup>3</sup>

Keempat, buku yang berjudul *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta, tahun 2004*, oleh ICW. Hasil temuannya menunjukkan bahwa: (a) kepala sekolah masih memonopoli kebijakan. Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah. Secara fungsional kepala sekolah mesti bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif<sup>4</sup>. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur, agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Artinya kepala sekolah mesti bisa melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik,

---

<sup>3</sup> Fauzi, *Op.Cit.* 2004: P.26

<sup>4</sup> *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta, (Jakarta, ICW, tahun 2004), hal 135*

yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Sebagai seorang manajer semua kegiatan memang harus dibawah pengawasannya, namun tidak berarti memonopoli kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi manajemen, kepala sekolah mesti melibatkan seluruh elemen yang ada dalam sistem, seperti guru, siswa, orang tua siswa, dan Komite Sekolah/Madrasah secara yuridis formal telah dikukuhkan melalui UU sisdiknas dan kepmendiknas No.044/U/2002, kepala sekolah memiliki partner yaitu Komite Sekolah/Madrasah. (b) Komite Sekolah/Madrasah tidak mampu menjalankan fungsinya. Padahal dalam kepmendiknas No.044/U/2002 ditegaskan bahwa Komite Sekolah/Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Sebagai badan independen Komite Sekolah/Madrasah memiliki empat peran yaitu pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan empat peran ini, Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga yang super. Akan tetapi hasil temuan ICW menunjukkan umumnya kemunculan Komite Sekolah/Madrasah berasal dari inisiatif kepala sekolah karena adanya tekanan dari pemerintah. Sehingga untuk membentuk Komite sekolah kepala sekolah biasanya mengambil jalan pintas dengan mengubah nama lembaga yang sudah ada seperti BP3 atau dengan menunjuk beberapa orang langsung menjadi pengurus Komite Sekolah/Madrasah. <sup>5</sup>

Beberapa hasil temuan, diantaranya adalah: (a) Komite sekolah/Madrasah di seluruh satuan pendidikan dan daerah belum berfungsi sesuai dengan harapan, tetapi keberadaannya menunjukkan kecenderungan yang baik dan cukup menjanjikan sebagai saluran sekaligus kekuatan pendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah; (b) ada isyarat bahwa ide-ide dasar partisipasi terhadap sekolah belum dipahami dengan baik dan utuh baik oleh pejabat-pejabat Pemerintah Daerah maupun oleh anggota Dewan Pendidikan, pengurus Komite sekolah, dan juga kepala sekolah (Faisal et.all., 2007: P.xxii); (c) Komite sekolah/Madrasah pada sekolah negeri lebih aktif dan berfungsi relatif baik, sementara pada sekolah-sekolah swasta masih berhadapan dengan masalah internal sekolah dan belum berbagi peran dengan yayasan pemilik sekolah. Meskipun sebagian kasus Komite sekolah/Madrasah di sekolah-sekolah swasta dapat menjalankan fungsi dan memainkan peran dengan cukup baik<sup>6</sup>.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi menurut Soekanto merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial

---

<sup>6</sup> Faisal. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari apangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*, UM Press, Malang, 2007. hlm 238

merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial.<sup>7</sup> Menurut George & Achilles, partisipasi sosial adalah *sometimes restricted to participation in voluntary organization, particularly those engaged in some type of community activity or project, out side of an individual's professional or occupational work situation.*<sup>8</sup>

Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.

## 2. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi seseorang terhadap kehidupan masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan Wajar 9 tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono<sup>9</sup> unsur yang mempengaruhi perubahan sosial diantaranya adalah:

- a. Kontak dengan kebudayaan lain, yang menyangkut hal ini adalah difusi (diffusion), artinya, proses terjadinya penyebaran unsur-unsur

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 45

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 67

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 78

kebudayaan dari individu kepada individu lain dan dari suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Penemuan tersebut dapat diteruskan dan disebarakan pada masyarakat luas.

- b. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan dan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya. Hal ini akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.
- c. Ketidak-puasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.

Menurut Taneko kekuatan-kekuatan yang mendorong suatu perubahan adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

- 1) Ketidak puas terhadap situasi yang ada. Karena itu ada keinginan untuk pindah ke situasi yang lain.
- 2) Pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya biasa saja.
- 3) Tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Taneko, Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama , 2006. hal 78

- 4) Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan misalnya produktifitas dan lain-lain.

Sementara itu menurut Lawang faktor-faktor berikut dilihatnya sebagai sumber inkonsistensi:

- 1) Faktor internal, atau dapat juga disebut sosiogenetik. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Faktor internal ini terdiri dari berbagai bagian yaitu :

- a) Penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, adalah inovasi (inovation). Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, Bergeraknya unsur-unsur kebudayaan baru ke lain-lain bagian masyarakat. Penemuan radio misalnya, akan menyebabkan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, agama, pemerintahan, dan seterusnya. Penemuan ini akan memancarkan pengaruhnya ke berbagai arah dan menyebabkan perubahan-perubahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat.
- b) Gerak sosial, yang terjadi karena adanya kegagalan yang terjadi dalam institusi, adanya kehidupan pribadi, adanya alternatif yang baru.
- c) Perencana sosial yang mencakup suatu proses bersama yang bersifat rasional. Perencana itu dilaksanakan atau dilakukan dalam

beberapa tahap, yang dimulai dari usulan, diskusi, penelitian-penelitian, kemudian dapat digunakan untuk menentukan tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

- 2) Faktor internal laten, yaitu faktor yang menyebabkan perubahan masyarakat yang bersifat terselubung atau semu. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat pemimpin dan karyawan merupakan suatu kebulatan dimana masing-masing karyawan mempunyai kepentingan sendiri dan lama kelamaan membentuk gerakan perubahan nasib, terutama kalau karyawan sedang tidak puas dengan kenyataan.
- 3) Faktor eksternal, yaitu memberikan perubahan kepada masyarakat yang berasal dari luar masyarakat sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain :
  - a) Faktor penduduk, yang mencakup pertumbuhan dan penyusutan penduduk.
  - b) Faktor perubahan lingkungan alam
  - c) Faktor kekuatan-kekuatan kelompok yang berpengaruh terhadap masyarakat bersangkutan.
  - d) Faktor kebudayaan.

Dari teori diatas dapat dipahami bahwa keterlibatan massa dalam suatu organisasi secara umum disebabkan oleh faktor-faktor seperti : adanya kedekatan wilayah, bentuk-bentuk aktifitas, bentuk dan interaksi, sentimen, persamaan sikap, perbandingan sosial, tukar-menukar antara imbalan dengan ongkos dan alasan praktis. Sementara itu ketertarikan

berorganisasi disebabkan oleh faktor kesamaan dan perbedaan dalam suatu hal, saling melengkapi, status dan keseimbangan.

Disamping itu berpindah dan berubahnya (inkonsistensi) minat seseorang terhadap suatu organisasi pada dasarnya disebabkan oleh terjadinya keretakan (interkasi yang dis-harmoni dalam organisasi, adanya penggerak-penggerak tertentu baik dari luar maupun dari dalam, adanya hasil budaya fisik seperti ide, keyakinan dan lain-lain, dan adanya suatu kepentingan seseorang untuk mempertahankan hidupnya.

Suatu hal yang utama, menurut Davis<sup>11</sup>, hasil psikologis pegawai dari manajemen partisipasi adalah partisipasi. Ini berarti bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan tersebut. Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki tiga gagasan penting, yakni keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab.

a. Keterlibatan mental dan emosional/inisiatif

Pertama dan yang paling utama, partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional daripada hanya berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini

---

<sup>11</sup> Davis. Kingsley. *Human society*. New york: The Macmillan company. 1995. hal 179

bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang berpartisipasi berarti terlibat egonya daripada hanya terlibat tugas. Sebagian manajer keliru memandang keterlibatan dalam pelaksanaan tugas sebagai partisipasi yang sesungguhnya. Mereka mengadakan pertemuan, meminta pendapat, dan sebagainya.

- b. Motivasi kontribusi Gagasan kedua yang penting dalam partisipasi adalah memotivasi orang-orang yang memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, partisipasi berbeda dari "kesepakatan". Partisipasi lebih dari sekadar upaya untuk memperoleh kesepakatan atas sesuatu yang telah diputuskan. Partisipasi sangat bernilai karena dapat meningkatkan motivasi dan membantu pegawai untuk memahami dan menjelaskan mereka mencapai tujuan.

- c. Tanggung jawab

Gagasan ketiga adalah partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mau mewujudkan keberhasilannya.

Pada saat orang-orang mau menerima tanggung jawab aktivitas kelompok, mereka melihat adanya peluang untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, yaitu merasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Gagasan tentang upaya menimbulkan kerja tim dalam

kelompok ini merupakan langkah utama mengembangkan kelompok untuk menjadi unit kerja yang berhasil. Jika orang mau melakukan sesuatu, mereka akan menemukan cara melakukannya.

Talidazuhu Ndraha memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :

- a) Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembagunan
- b) Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan
- c) Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan
- d) Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara
- e) Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara<sup>12</sup>

Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :

- a. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat
- b. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan
- c. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat desa<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 179

<sup>13</sup> Soebroto. Sutarto. 1988. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka.

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: **pertama**, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. **Kedua**, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.<sup>14</sup> Bank Dunia memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif

---

<sup>14</sup> Soetrisno. Hadi. 1995. *Sosiologi Pendidikan: Membangun Partisipasi masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset

pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.<sup>15</sup>

Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa parasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan.<sup>16</sup>

Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan ).

Sedangkan Moeljarto memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 128

<sup>16</sup> Sumodiningrat. Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia , 1999. hal 106.

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
- e. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan
- f. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat
- g. Partisipasi menopang pembangunan
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
- i. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah
- j. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.<sup>17</sup>

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan (3) Keterlibatan dalam

<sup>17</sup> Mulyarto, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Cita Utama. 1998. hal 89

memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan. Sedangkan Talizuduhu Ndraha memberikan pemaparan bentuk partisipasi, sebagai berikut:

- a) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
- b) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi; baik dalam arti mengiyakan, menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan dengan syarat maupun menolaknya
- c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat
- d) Partisipasi dalam operasional pembangunan
- e) Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan
- f) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan baik jika sistem pelaksanaan pembangunan kehumasan yang ada

melibatkan atau memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat. Soetrisno (1995) memberikan beberapa syarat untuk mengembangkan sistem pembangunan yang partisipatif, yaitu : (1) Mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksana pembangunan, (2) Toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sifat *positif thinking* di kalangan aparat pelaksana, (3) Menimbulkan budaya di kalangan pengelola pemerintahan/pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka masing-masing dan (4) Menimbulkan kemampuan untuk merancang atas dasar skenario, (5) Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri .

Syarat-syarat yang diajukan Soetrisno dapat dilaksanakan dalam model pembangunan yang menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada di masyarakat dan menyusunnya dalam dokumen tertulis, yaitu rencana pembangunan di suatu wilayah. Model ini melihat bahwa masyarakat merupakan sesuatu yang *turbulence* atau penuh dengan nilai sosial budaya yang dinamis. Dengan kata lain model ini melihat masyarakat merupakan sistem yang mandiri, sehingga perencanaan bukan bertujuan untuk memanipulasi sistem menjadi subsistem yang bergantung pada suprasistem, melainkan lebih

bertujuan untuk menimbulkan keserasian antara kedua sistem, yaitu sistem mikro dan makro. Model yang demikian selanjutnya dikenal dengan *Human Action Planning Plan*.

Sedangkan model lainnya yang dikenal adalah *Mechanistic Planning Model* atau *Social Engineering Model*, yang melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk merubah suatu keadaan. Si perencana perubahan berfungsi sebagai seorang ahli teknik yang bertugas membuat *blue print* perubahan tersebut serta menciptakan upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang dirancang.

Pengertian partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan (kehutanan), yang dapat mempunyai pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Sehingga, menurut Awang, partisipasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : cara pandang dimana partisipasi merupakan kegiatan pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan; cara pandang dimana masyarakat secara massal telah menyumbang jerih payah dalam pembangunan; dan bahwa partisipasi harus terkait dengan proses pengambilan keputusan di dalam pembangunan.

### **3. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat**

Hobley (dalam Awang, 1999) merumuskan tingkatan dan arti partisipasi berdasar pengalamannya melaksanakan kegiatan pembangunan, yaitu:

a. *Manipulatif Participation*

Karakteristik dari model ini adalah keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu

b. *Passive Participation*

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi datang dari administrator tanpa mau mendengar respon dari masyarakat tentang keputusan atau informasi tersebut

c. *Participation by Consultation*

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-maslah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisis. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan- pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

d. *Participation for Material Incentive*

Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin saja petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam proses percobaan- percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model ini adalah apabila insentif habis, maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.

#### e. *Functional Participation*

Partisipasi rakyat dilihat oleh lembaga eksternal sebagai tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti ini mungkin cukup menarik, karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tetapi hal ini terjadi setelah keputusan utamanya telah ditetapkan oleh orang dari luar desa tersebut. Pendeknya, masyarakat desa dikooptasi untuk melindungi target dari orang luar desa tersebut.

#### f. *Interactive Participation*

Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengemabangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi lokal dilihat sebagai hak dan tidak hanya merupakan suatu cara untuk mencapai suatu target proyek saja. Proses melibatkan multi disiplin metodologi, ada proses belajar yang terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada.

#### 7. *Self-Mobilisation*

Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk *advis*

mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, motivasi orang tua atau masyarakat dalam menyekolahkan anak sejak usia dini juga dipengaruhi oleh sikap mental masyarakatnya, tinggi rendah masyarakat dalam berpartisipasi sejalan dengan faktor-faktornya.

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, kesinambungan penelitian dan pengujian kembali sebuah penelitian mutlak diperlukan. Terutama terhadap hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti tentang penerapan konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah, terutama madrasah. Menurut Sony Keraf dan Mikhael Dua, seperti dikutip oleh Syamsul Arifin, bahwa penting disadari terhadap adanya dua hal pokok apa yang dalam kajian filsafat ilmu disebut dengan *context of discovery* dan *context of justification*.<sup>18</sup> Yang ingin ditekankan dalam *context of discovery* adalah bahwa, ilmu pengetahuan, tentunya, di dalamnya termasuk hasil penelitian sosial tentang fenomena keagamaan, tidak terjadi, ditemukan, dan berlangsung dalam kevakuman. Ilmu pengetahuan selalu ditemukan dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dalam konteks sosial tertentu. Adapun yang dimaksud dengan *context of justification* adalah konteks di mana kajian ilmiah dan hasil-hasilnya akan selalu

---

<sup>18</sup> Arifin, Imron, *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs dan Multi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Makalah Penelitian Kualitatif bagi Dosen PTAI se-Kopertais Wilayah IV, Unisma, Malang, 2000, hlm 234

diujiberdasarkan kategori dan kriteria yang murni ilmiah. Semua faktor di luar yang ilmiah ini, harus ditinggalkan. Satu-satunya yang dipentingkan adalah bukti empirik dan penalaran logis-rasional dalam membuktikan kebenaran suatu tesis atau teori.

Atas dasar adanya *context of discovery* dan *context of justification* ini, maka apa yang telah dihasilkan oleh para peneliti terdahulu, tentu terbuka sekali peluang untuk dikritik melalui mekanisme penelitian ilmiah di masa-masa yang akan datang. Yang mendasari pemikiran ini, karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ilmuwan, sangat berhubungan dengan suatu konteks ruang dan waktu tertentu, sehingga, misalnya, teori yang dihasilkan, akan selalu dipertanyakan relevansinya sebagai alat untuk menganalisis (*tool of analysis*) perubahan suatu fenomena.

Berangkat dari dua aspek dalam kajian filsafat ilmu itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi-kontribusi. Diantaranya adalah kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritisnya adalah sebagai berikut: pertama, dari segi substansi, permasalahan yang diteliti, memberikan kontribusi dalam memahami fenomena gerakan penyadaran dan pemahaman berpartisipasi terhadap sekolah secara lebih menyeluruh dan mendalam. Dari hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat terhadap sekolah masih bersifat partisipasi semu (*pseudoparticipation*) dan belum sampai pada tahap rasa kepemilikan (*ownership*) secara membudaya dan berkelanjutan. Misalnya, penelitian terhadap partisipasi masyarakat terhadap sekolah yang dilakukan

oleh Faisal *et.all.*, hanya menjawab dua pertanyaan pokok, apa wujud nyata partisipasi masyarakat terhadap sekolah dan menjawab pertanyaan mengapa wujudnya demikian. Banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab, misalnya, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak sekolah dan lembaga partisipasi masyarakat, menyadarkan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Dan kenapa masyarakat belum menyadari dan memahami konsep partisipasi terhadap sekolah? Apa yang melatarbelakangi masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah-sekolah tertentu saja? Ada juga yang meneliti tentang kinerja komite sekolah. Penelitian ini secara khusus menjelaskan tentang kinerja komite sekolah. Namun sayangnya, penelitian ini hanya dengan jeda waktu satu tahun, antara waktu penelitian berlangsung dengan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2003 tentang komite sekolah. Sehingga penelitian ini tidak memberikan jawaban yang lengkap tentang pentingnya lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah untuk membangun kesadaran masyarakat luas untuk berpartisipasi terhadap sekolah.

Kedua, penelitian ini memiliki kontribusi untuk memperkaya pendekatan dalam meneliti fenomena keagamaan untuk berpartisipasi terhadap sekolah, lebih-lebih fenomena partisipasi masyarakat terhadap madrasah, yang merupakan sekolah Islam yang berstatus negeri. Ada tiga teori yang dipilih dalam memahami fenomena partisipasi di bagian penelitian ini, yaitu: pertama, menggunakan teori gerakan sosial. Konsep ini oleh Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Arifin menyebutnya dengan faktor ideologis.

Jika suatu gerakan sosial tidak ditopang oleh ideologi, maka akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Kedua, menggunakan teori motivasi. Teori motivasi yang digunakan dalam penelitian adalah teorinya David McClelland. Ketiga, menggunakan konsep-konsep Islam untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah. Adapun kontribusi praktisnya adalah: (1) bagi madrasah untuk penyempurnaan praktik. Penelitian ini diupayakan untuk menghasilkan deskripsi dan analisis tentang partisipasi masyarakat terhadap sekolah dalam tempat dan kurun waktu yang berbeda tentang fokus masalah, kegiatan atau program yang sama, sehingga dapat menjadi penyempurnaan praktik pada MI secara khusus dan secara umum sekolah lainnya di Pagerbarang; (2) bagi kepala sekolah, Komite sekolah/Madrasah, dan pengelola/yayasan pendidikan. Penelitian ini juga akan diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi perumusan, implementasi dan perubahan kebijakan kepala sekolah MTS / SMP merupakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan melalui UU Sisdiknas dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah Komite sekolah, dan pengelola/yayasan pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan yang tengah berjalan; (3) bagi Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Penelitian ini akan diarahkan untuk dapat memberikan masukan kepada dua lembaga tersebut untuk lebih pro aktif-dinamis, inovatif-kreatif, dan efektif-efisiensi terhadap pengelolaan pendidikan untuk tercapai mutu pendidikan nasional; (4) bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi klarifikasi

dan isu-isu tindakan sosial. Komite sekolah/Madrasah sebagai kebijakan baru, dalam perjalanannya tentu banyak pemerhati pendidikan ataupun kelompok oposisi pemerintah melakukan kritik-kritik dan mengembangkan isu-isu tindakan sosial.

### 3. Wajib Belajar 9 Tahun

#### a. Dasar Filosofis Wajib Belajar 9 Tahun

Para *founding fathers* sadar sepenuhnya bahwa untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Kesadaran tersebut dituangkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya, pada batang tubuh, pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan“(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ”(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada masa reformasi, dengan memperhatikan kondisi global, percepatan akselerasi pembangunan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan. Untuk mendasarinya, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen dan pasal 31 UUD 1945 ditambah ayatnya menjadi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia<sup>19</sup>.

Secara universal, pengakuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap umat manusia termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang pada pasal 26 ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama, berdasarkan kepantasan.” Kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana sistem pendidikan yang ideal, yang menggambarkan suatu bentuk sistem persekolahan disertai sistem pendidikan luar sekolah, dengan tahapan yang linier.

Selanjutnya, tonggak penting pembangunan pendidikan setelah kemerdekaan adalah disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang no. 12 Tahun 1954.<sup>20</sup> Undang-undang ini merupakan dasar

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke-III dalam Sidang Umum MPR tahun 2003.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 12

hukum Sistem Pendidikan Nasional yang pertama diundangkan. Dalam perkembangan kehidupan bangsa, Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan undang-undang yang sudah dua kali berubah, yaitu UU No. 2 Tahun 1989 maupun UU No. 20 Tahun 2003.

Dalam semua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini, terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan perkataan lain, pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa.

Faktor pendidikan diyakini memiliki nilai kontribusi yang sangat tinggi bagi produktivitas nasional. Berbagai penelitian di sejumlah negara telah membuktikan bahwa peningkatan pendidikan berimplikasi positif dan signifikan terhadap peningkatan *national income*. Sebagai contoh, peningkatan pendidikan di Amerika Latin telah mampu mengontrol

peningkatan “*national income*” wilayah tersebut hingga 25%. Sebagai implikasi nyata dari pengembangan dan peningkatan pendidikan, di Columbia terjadi peningkatan pendapatan nasional dari 7,1% menjadi 11,7%; di Honduras dari 9,4% menjadi 15,6%; dan di Venezuela terjadi peningkatan dari 4,4% menjadi 9,2%.<sup>21</sup>

Peran pendidikan dalam peningkatan produktivitas nasional yang ditunjukkan oleh data-data estimasi di atas sangat berterima dan beralasan. Hal ini terutama jika ditinjau dari keberadaan pendidikan yang pada hakikatnya merupakan *indirect investment* bagi proses produksi dan *direct investment* bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human quality*). Pendidikan akan meningkatkan dan/atau mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih trampil, handal, dan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.

Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia secara terstruktur melaksanakan Program Wajib Belajar. Program dimulai dengan Wajib Belajar 6 Tahun yang secara resmi dicanangkan pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang

---

<sup>21</sup> World Bank, *The World Bank Annual Report Fiscal Year 2001*, Washington DC, 2002, hal 23

dimulai pada tahun 1994. Program ini menargetkan pada tahun 2008.<sup>22</sup>[4], semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Dengan bekal itu, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut sehingga mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menjelang terminal akhir tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun, fokus pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah mulai bergeser pada pilar peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, mulai tahun ini (2008) pemerintah mulai mengurangi program perluasan dan pemerataan akses dan menambah anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan karena terjadi kesenjangan yang merisaukan antara upaya perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Realita di masyarakat saat ini, walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat SD sudah di atas 96% dan SMP sudah di atas 92%, namun ternyata kehidupan bangsa yang cerdas masih jauh dari terwujud.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ketika dicanangkan pada tahun 1994, Program Wajar Dikdas 9 Tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar disesuaikan dari tahun 2003/2004 menjadi tahun 2008/2009, hal 112

<sup>23</sup> Direktorat Pembinaan SMP, *Panduan Pelaksanaan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses SMP (Dekonsentrasi)*, ((Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 34-37

<sup>24</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008) hal 26

## b. Pentingnya Pelaksanaan Wajib Belajar

Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Hasil Konferensi Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) di Jomtien, Thailand, Maret 1990. Konferensi yang dihadiri oleh 1500 peserta dari 155 negara tersebut menegaskan bahwa “pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan lingkungan”.<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan pendidikan untuk semua tersebut, deklarasi pendidikan untuk semua di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan dasar, adalah pendidikan semesta (*Universal*

---

<sup>25</sup> The World Bank Annual Report, 1991:52.

*Education*). Artinya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dikerangkakan untuk membuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

Sejalan dengan isi deklarasi tersebut, awalnya Program Wajib Belajar di Indonesia dimaknai sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan tertentu .

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara keseluruhan, Program Wajib Belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tersebut, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Program Wajib Belajar mendesak untuk dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung.

Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang mengembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (*educational for all*).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan

Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).<sup>26</sup> Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh *The International Development Research Center*, meliputi: (1) kemampuan berkomunikasi; (2) kemampuan dasar berhitung; (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah; (4) pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja; dan (5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio<sup>27</sup>. Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Dalam perkembangannya, dengan diundangkannya UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan, kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan dasar (peserta Wajib Belajar 9 Tahun) diatur dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

<sup>27</sup> IDRC, *World Literacy*, 1989, h 115

<sup>28</sup> Prayitno, *Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak*. (Padang: Jurusan BK FI P UNP, 2000.)  
hal 34

Di samping itu, menurut May, wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orangtua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional.<sup>29</sup> Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang mangkus (efektif).

Pelaksanaan dan ketuntasan program wajib belajar juga mampu mengurangi angka kemiskinan. Melalui pendidik ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pendidikan adalah kekuatan”, maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global.

Lebih lanjut, wajib belajar merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global. Pendidikan dasar juga mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas, dan ekonomi yang mapan sehingga negara menjadi maju.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M, May, *Pekerja Anak dan Perencanaan* (AusAID, 1998) hal. 65.

<sup>30</sup> David Atchoarena dan Francoise Caillods. *Pendidikan Untuk Abad XXI* (UNESCO: Unesco Publishing, 1998), hal 12

Di sisi lain, pelaksanaan wajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Setiap warga negara mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan 4) Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

### 3. Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar

Strategi pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia, saat ini, dilaksanakan dengan menerapkan beberapa pendekatan, meliputi: pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan agama, pendekatan birokrasi, pendekatan hukum, serta pendekatan konteks.<sup>31</sup>

#### (a) Pendekatan Budaya

Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

---

<sup>31</sup> Direktorat Pembinaan SMP, *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 1

### (b) Pendekatan Sosial

Sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B.

### (c) Pendekatan Agama

Pada daerah tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat mentaati ayat-ayat suci. Untuk daerah seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.

### (d) Pendekatan Birokrasi

Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di

tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain.

(e) Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep “*universal basic education*” dan belum menerapkan konsep “*compulsary education*”. Artinya, program wajib belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep “*compulsary education*”, sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik.<sup>32</sup>

Untuk mempercepat akselerasi penuntasan wajib belajar, pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006

---

<sup>32</sup> Direktorat Pembinaan SMP, *Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*, (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 27

tentang *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Inpres ini menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah yang dimaksud.

### 3) Kondisi Pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun

Indikator yang dipakai pemerintah untuk mengukur ketercapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK).<sup>33</sup> APK adalah hasil perhitungan jumlah siswa SMP/ sederajat di suatu daerah dibagi jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 tahun dikali 100%. Tingkat ketuntasan daerah dalam melaksanakan program Wajar Dikdas 9 Tahun dikategorikan:

- (1) Tuntas pratama, bila APK mencapai 80% s.d. 84%
- (2) Tuntas madya, bila APK mencapai 85 % s.d. 89%
- (c) Tuntas utama, bila APK mencapai 90% s.d. 94%
- (d) Tuntas paripurna, bila APK mencapai minimal 95%.

### b) Mutu Pendidikan

Mutu secara etimologis bersinonim dengan kata ‘kualitas, bobot, derajat, jenis, karat, kadar, kelas, nilai, taraf’.<sup>34</sup> Dengan kata lain, mutu

---

<sup>33</sup> Depdiknas, *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007*, ((Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h. 59. Lihat juga Direktorat Pembinaan SMP, *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal. 28

<sup>34</sup> Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2008) hal. 331

adalah kondisi (kualitas, bobot, derajat, dst) barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah proses. Batasan mutu biasanya disertai deskripsi proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut.

Pembahasan tentang mutu biasanya tidak dilepaskan dari tonggak sejarah yang menempatkan mutu sebagai esensi utama yang harus dipertimbangkan dari sebuah rencana kerja (produksi). Dua nama yang sering disebut sebagai “Bapak Mutu” adalah Dr. W. Edward Deming dan Dr. Joseph M. Juran. Keduanya adalah konsultan mutu berkebangsaan Amerika yang berhasil secara gemilang “membangunkan” industri di Jepang setelah hancur lebur pasca Perang Dunia II. Keduanya menempatkan kontrol mutu menjadi salah satu gugus kerja dalam proses produksi. Dalam bidang pendidikan Juran menegaskan bahwa dasar misi mutu sebuah sekolah adalah “mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat”<sup>35</sup>.

Lewis dan Smith secara lebih rinci menterjemahkan bahwa mutu secara keseluruhan (*total quality*), termasuk dalam bidang pendidikan, mencakupi tiga ranah yang wajib diperhatikan yaitu: seluruh proses, seluruh pekerjaan, dan seluruh personil yang terlibat.<sup>36</sup> Pertama, *total quality* mencakup seluruh proses, bukan hanya proses produksi semata. Di dalamnya juga harus tercakup pengembangan proses perancangan,

---

<sup>35</sup> Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal. 8

<sup>36</sup> Ralp G Lewis dan Douglas H. Smith, *Total Quality in Higher Education* (Florida: St. Lucie Press. 1994) hal.28

pembangunan, penelitian dan pengembangan, akunting, pemasaran, layanan perbaikan, dan seluruh fungsi lainnya. Kedua, *total quality* menghendaki dilaksanakannya setiap pekerjaan yang terkait dalam proses secara prima (profesional). Ketiga, *total quality* menghendaki semua orang yang terlibat dalam pekerjaan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang menjadi tugasnya. Wanprestasi pada salah satu pekerjaan akan sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan secara keseluruhan.

Dalam bidang pendidikan, untuk bisa menghasilkan mutu, terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :

1. Menciptakan situasi menang-menang (*win-win solution*) dan bukan situasi kalah menang diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
2. Perlunya ditumbuhkembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Slamet, Margono, *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu* (IPB Bogor, 1999) h. 34

Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha jasa yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut.

Pelanggan layanan pendidikan terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok. Mereka itu adalah *pertama* yang belajar, bisa mahasiswa/ pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. *Kedua*, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*). Pelanggan lainnya yang *ketiga* bersifat tersier adalah lapangan kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*). Selain itu, yang *keempat*, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (*internal customers*).<sup>38</sup> Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam

---

<sup>38</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008) hlm. 126.

proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas lembaga pendidikan mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun finansial.

Seperti disebut di atas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan di atas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

Potensi perkembangan, dan keaktifan murid tentu saja merupakan yang paling utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Perkembangan fisik yang baik, baik jasmani maupun otak, menentukan kemajuannya. Demikian pula dengan lainnya, misalnya bakat, perkembangan mental, emosional, pribadi, sosial, sikap mental, nilai-nilai, minat, pengertian, umur, dan kesehatan; kesemuanya akan mempengaruhi hasil belajar dan mutu seseorang. Untuk itu, maka perhatian terhadap peserta didik menjadi sangat penting.

### **C. Kerangka Teori**

Kata kunci yang digunakan sebagai istilah dalam penelitian ini, yaitu: istilah "partisipasi", "masyarakat", dan sekolah/madrasah. (1) "partisipasi". Adalah suatu istilah yang memiliki padanan kata dengan "peran serta", "keterlibatan", "keterwakilan", dan bentuk-bentuk makna lain yang sepadan.

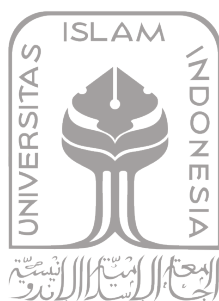
Penggunaan istilah partisipasi dalam penelitian ini adalah partisipasi yang bermakna peran serta, keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terhadap sekolah; (2) "masyarakat". Term "masyarakat" banyak sekaligus memaknainya dengan berbagai bentuk makna. Sekian banyaknya pengertian tersebut, dikutip salah satu pendapat Quraish Shihab<sup>39</sup> masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuanadat, ritus, atau hukum khas, dan hidup bersama. Al-Qur'an, menurut QuraishShihab, menggunakan istilah "qawm", "ummah", "syū'ub", dan "qabāil", untuk7 memaknai "masyarakat". Sebagaimana Ali Syari'ati dalam bukunya *Ummah wa al-Imāmah* (1990) dikutip Dawam Rahardjo, Istilah ini oleh Sari'ati membandingkan dengan beberapa istilah Inggris, yaitu "nation", "strata", "class", "social class" "race", "mass", "society"<sup>40</sup>. Dari istilah ini, Syari'ati,berkesimpulan bahwa manusia sepanjang sejarah dan di bumi manapun, hidupberkelompok. Oleh Quraish Shihab disebut "makhluk sosial" yang salingbergantungan satu sama lain. Jadi, yang dimaksudmasyarakat dalam penelitian ini adalah segenap manusia yang tidak dibatasi oleh ruang, komunitas dan waktu tertentu, tetapi manusia atau masyarakat yang memberikan peran sertanya terhadap sekolah khususnya wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang; (3) Bentuk partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun dapat diwujudkan dengan bentuk organisasi wali murid atau

---

<sup>39</sup> Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke Empat, Mizan, Bandung, 1996. hlm 320

<sup>40</sup> Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cetakan Pertama, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1996, hlm 215

komite sekolah, BP3 dan yayasan peduli pendidikan. Lembaga pendidikan swasta berbasis masyarakat seperti madrasah sebagai bentuk refleksi untuk mensukseskan wajar 9 tahun.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*fieldresearch*), untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan paradigma rasionalistik, yaitu mengedepankan pemikiran terlebih dahulu dalam bentuk konsep atau teori, sebagai landasan untuk menelaah gejala yang terjadi dan melakukan suatu tindakan. Penelitian ini juga akan ditunjang dengan data sekunder dan penelaan pustaka (*literature study*), terutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan landasan teori.

#### **B. Tahap Penelitian**

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan latar belakang masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
2. Studi literature meliputi:
  - a. Teori- teori partisipasi masyarakat
  - b. Teori-teori sosial budaya masyarakat
3. Pengumpulan data primer dan sekunder;
4. Analisis data kualitatif dan kuantitatif;

## 5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang representative dan sejalan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut (Slamet dalam <http://tesis-sertasi.blogspot.com/2008/04/studipustaka.html>, 6 April 2008):

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara Tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang terpilih. Teknik ini digunakan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Beberapa hal yang belum tercakup dalam pertanyaan dapat digali dengan teknik ini.

#### b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti, melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder, melalui studi pustaka/literatur dilengkapi dengan data statistik, peta, foto, dan gambargambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

## D. Sumber Data

### 1. Tokoh Masyarakat

Sumber data dari tokoh masyarakat adalah masyarakat Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebanyak 13 Desa yaitu:

- 1) Pagerbarang
- 2) Pesarean
- 3) Surokidul
- 4) Randusari
- 5) Semboja
- 6) Mulyoharjo
- 7) Sidomulyo
- 8) Rajegwesi
- 9) Srengseng
- 10) Karanganyar
- 11) Kertaharja
- 12) Kedungsugih
- 13) Jatiwangi<sup>1</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Dari masing-masing desa diambil 4 desa yang memiliki lembaga

Pendidikan SMP/MTs yaitu desa:

- a. Kedungsugih sebanyak 2 orang
- b. Sidomulyo sebanyak 2 orang
- c. Karanganyar sebanyak 2 orang

---

<sup>1</sup> Data Kantor Kecamatan Pagerbarang, per 25 April 2012



disimpulkan. Apabila ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data.

*Ketiga*, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan juga sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan apa isi informasi dan maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada saat data telah terkumpul banyak yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif, hal ini dipahami sebagai pendekatan kualitatif dengan ciri mengakui kebenaran berdasarkan tangkapan indrawi (apa adanya), memerlukan akal dan logika dalam menjelaskan dan berargumentasi (Muhadjir,1996:83) yang didukung dengan metode kuantitatif. Metode ini lebih cenderung digunakan dengan memakai pendekatan secara deskriptif yaitu analisis objek penelitian melalui uraian serta penjelasan dari data-data yang didapatkan guna diolah menjadi beberapa informasi.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pada bagian ini, setelah proses penyajian, dan penganalisan data, langkah selanjutnya yang ditempuh peneliti adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Pada tahap ini peneliti menggunakan sembilan cara seperti disarankan oleh Moleong.<sup>3</sup> Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: (1) perpanjangan keikutsertaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Sebagaimana di awal penelitian ini, telah ditetapkan jadwal tentatif penelitian mulai dari bulan Mei

---

<sup>3</sup>Laxy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Angkasa. 2000, hlm 123

2012- Juli 2012. Langkah ini ditempuh setelah peneliti melakukan telaah intensif terhadap temuan-temuan yang diyakini masih kurang; (2) ketekunan pengamatan. Teknik ini dilakukan dengan maksud untuk lebih fokus didalam melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas, sikap pada saat sedang berwawancara, observasi, dan pengambilan dokumen. Hal ini dilakukan mengingat objek kajian adalah manusia. Sementara setiap manusia memiliki keragaman karakter dan sikap mental. Ada yang memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap objek kajian, ada juga bersikap mental sebaliknya; (3) *triangulasi*.

Teknik ini akan digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dalam rangka melengkapi informasi yang telah diperoleh atau mengecek kebenaran informasi yang dikemukakan seorang sumber dengan cara menanyai sumber lain yang berkaitan dengan data yang dicari. Misalnya, keterangan masyarakat dicocokkan dengan kepala MTs atau SMP Triangulasi metode dilakukan untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan hasil angket atau pun sebaliknya; (4) pemeriksaan sejawat. Teknik ini dilakukan dengan diskusi secara informal dengan dosen mata kuliah metodologi penelitian dan pembimbing; (5) teknik analisis kasus negatif. Teknik ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan; (6) kecukupan referensi. Dalam penelitian ini, digunakan teknik ini untuk menjaga semua informasi yang dicatat memiliki sumber yang

jelas atau setidaknya-tidaknya fenomenanya jelas dapat ditangkap. Kecukupan referensial bermakna sebagai teknik yang mengharuskan peneliti untuk bisa menghasilkan material data yang membuat segala informasi yang telah diperoleh dilapangan. Titik sentral kecukupan referensial bukan semata-mata kualitas materialnya, melainkan juga penanganannya agar tidak rusak atau hilang, walaupun hilang atau rusak masih tersedia foto kopinya; (7) pengecekan anggota.

Laporan rinci ini nantinya akan menggambarkan konteks penelitian, ini dimaksudkan untuk mempermudah upaya transferability pada kasus yang memiliki ciri-ciri sama; dan (9) auditing. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahapan ini: (1) melalui seminar proposal dengan partisipasi teman-teman kuliah; dan (2) melakukan auditing oleh tim dosen pembimbing dan penguji.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

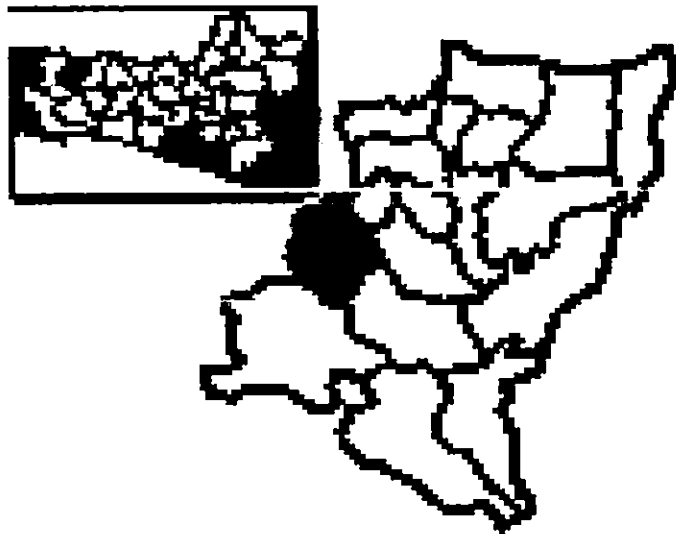
#### A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, akan membahas dua hal penting, yaitu: Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dan pendorong partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun baik Madrasah maupun Sekolah.

##### 1. Kondisi Geografis Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Pagerbarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Jatibarang Brebes, timur kecamatan Dukuwaru dan Lebaksiu, selatan kecamatan Balapulang dan Margasari, barat Kabupaten Brebes. Berikut adalah peta kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Gambar 1 Peta Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal



Kecamatan Pagerbarang terbagi dalam 13 desa yaitu:

1. Jatiwangi
2. Karanganyar
3. Kedungsugih
4. Kertaraharja
5. Mulyoharjo
6. Pagerbarang
7. Pesarean
8. Rajegwesi
9. Randusari
10. Semboja
11. Sido Mulyo
12. Srengseng
13. Surokidul.<sup>1</sup>



## 2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pagerbarang

Kecamatan Pagerbarang terletak di wilayah Barat Kabupaten Tegal, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Brebes. Realitas Kecamatan Pagerbarang dapat dikatakan koa kecamatan yang masih berkembang, bila dilihat dari segi kepadatan jumlah penduduk maka Kecamatan Pagerbarang dapat dikatakan memiliki penduduk yang cukup padat. Namun dilihat dari sudut kesemarakan beragama maka Pagerbarang sebagai kota kecil yang religius dapat dilihat dari cukup banyaknya tempat-tempat ibadah (mushollah dan masjid) dan lembaga-lembaga keagamaan.

---

<sup>1</sup> Bank Data Kantor Camat Pagerbarang 21 Juli 2012

Tabel 4.1  
Keadaan Penduduk  
Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal Tahun 2012

No	Desa	L	P	Jumlah
1	Pagerbarang	3765	3023	6788
2	Pesarean	2047	2763	4810
3	Surokidul	2302	2255	4557
4	Randusari	4171	4211	8382
5	Semboja	1191	1457	2648
6	Mulyoharjo	2110	2543	4653
7	Sidomulyo	2876	2944	31838
8	Rajegwesi	3004	3127	6131
9	Jatiwangi	2776	3097	5873
10	Srengseng	3632	3780	7412
11	Karanganyar	4908	5223	10131
12	Kertaharja	2088	3027	5115
13	Kedungsugih	2466	2954	5420
	Jumlah	37336	40404	103758

Sumber Data: Diolah dari Profil Kantor Kecamatan Pagerbarang Juli 2012

Berdasarkan data diatas maka diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Pagerbarang sebanyak 103.758 jiwa yang tersebar di 13 desa dengan luas tanah seluas 12.289 Ha. Ditinjau dari segi pemeluk agama dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 4.2  
Keadaan Penduduk ditinjau Menurut Agama  
Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal Tahun 2012

No	Desa	AGAMA					Jumlah
		ISLAM	KK	KP	HIN	BUD	
1	Pagerbarang	6770	10	4	4	-	6788
2	Pesarean	4810	-	-	-	-	4810
3	Surokidul	4557	2	-	-	-	4557
4	Randusari	8372	12	-	-	-	8382
5	Semboja	2648	-	-	-	-	2648
6	Mulyoharjo	4653	-	-	-	-	4653
7	Sidomulyo	31838	-	-	-	-	31838
8	Rajegwesi	6131	-	-	-	-	6131
9	Jatiwangi	5873	-	-	-	-	5873

10	Srengseng	7412	-	-	-	-	7412
11	Karanganyar	10131	-	-	-	-	10131
12	Kertaharja	5115	-	-	-	-	5115
13	Kedungsugih	5420	-	-	-	-	5420
	Jumlah	103758					103758

Sumber Data: Diolah dari Profil Kantor Kecamatan Pagerbarang Juli 2012

Keterangan:

I = Islam

Hn = Hindu

KK = Kristen Katolik

Bd = Budha

KP = Kristen Protestan

Masyarakat muslim merupakan mayoritas penduduk (96,23%). Adapun pemeluk non muslim sebanyak 3,77%.

Pada dimensi yang lain dapat pula diketahui pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang ada di Kecamatan Pagerbarang ini. Potensi yang menonjol adalah pendidikan baik SMP maupun MTs. Dilihat dari perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk serta varian lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Tabel 4.3  
Keadaan Pendidikan Masyarakat Kec Pagerbarang Kab Tegal Tahun 2012

No	Desa	Lembaga Pendidikan					Jumlah
		SD	MT	MTS	SMP	SLTA	
1	Pagerbarang	4	1	-	-	2	7
2	Pesarean	2					2
3	Surokidul	3					3
4	Randusari	7	1		1		9
5	Semboja	2					2
6	Mulyoharjo	2		1			3
7	Sidomulyo	2		1	1		4
8	Rajegwesi	2	1				3
9	Jatiwangi	3					3
10	Srengseng	3					3
11	Karanganyar	1	1	1			3
12	Kertaharja	3					3
13	Kedungsugih	1		1			2
	Jumlah	35	4	4	2	2	47

Sumber Data: Diolah dari Profil Kantor Kecamatan Pagerbarang Juli 2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perkembangan Lembaga Pendidikan tingkat dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs di kecamatan Pagerbarang sebanyak 45 lembaga pendidikan, untuk SMP sebanyak 2 buah semuanya negeri, MTs sebanyak 4 buah semuanya swasta. Apabila dilihat dari segi perkembangan lembaga pendidikan swasta yang meliputi MI dan MTS tampaknya cukup dalam menampung siswa yang usia sekolah yang lulus SD atau MI.

Tabel 4.4  
Keadaan Pekerjaan Masyarakat Pagerbarang Tahun 2012

NO	Jenis /Bidang Pekerjaan	Jumlah
1	Perdagangan	33045
2	Pertanian	47327
3	Jasa angkutan	6011
4	Jasa	754
5	TKI di Luar Negeri	1015
6	PNS/TNI/POLRI	671
7	Karyawan Non PNS	389
8	Nelayan	19
9	Mahasiswa	1287
10	Pelajar	10264
11	Lain-lain	2976
	Jumlah	103758

Tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang mendasari kehidupan masyarakat adalah pertanian sejumlah 47327, Perdagangan sebanyak 33045 orang, dan jasa angkutan sebanyak 6011 orang. Data ini menunjukkan bahwa Pagerbarang merupakan kecamatan yang tidak kalah bersaing dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Tegal, tetapi juga dikenal sebagai penghasil pertanian yang baik. Realitas

Kecamatan Pagerbarang sebagai desa yang dapat dilihat dari cukup banyaknya tempat-tempat pendidikan, Kecamatan Pagerbarang dengan suhu rata-rata 34,5 derajat celcius dan letak ketinggian antara 10 sampai 11 meter di atas permukaan laut, telah menjadikannya sebagai kecamatan penyangga Kecamatan lainnya. Ditinjau dari segi usia anak sekolah wajib pendidikan dasar 9 tahun, bahwa Kecamatan Pagerbarang Tahun 2012 siswa Pra sekolah sampai SMP/MTS sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Keadaan Penduduk ditinjau Menurut Usia Anak Sekolah Wajar 9 Tahun  
Kecamatan Pagerbarang Kab Tegal Tahun 2012

No	Desa	AGAMA				Jumlah
		0-4	TK	SD/MI	SMP/MTS	
1	Pagerbarang	209	115	657	309	1290
2	Pesarean	189	156	430	150	925
3	Surokidul	199	187	456	112	954
4	Randusari	204	217	807	402	1630
5	Semboja	154	89	412	287	942
6	Mulyoharjo	166	76	367	292	901
7	Sidomulyo	189	213	410	289	1101
8	Rajegwesi	172	194	459	103	928
9	Jatiwangi	188	162	539	95	984
10	Srengseng	201	256	567	178	1202
11	Karanganyar	267	219	806	89	1381
12	Kertaharja	187	234	487	119	1027
13	Kedungsugih	208	192	312	102	814
	Jumlah	2533	2310	6709	2527	14079
	Persen	17.9%	16.4%	47.6%	18,1%	

Sumber Data: Diolah dari Profil Kantor Kecamatan Pagerbarang Juli 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk usia SMP/MTs tahun 2012 sebanyak 1409 siswa yang tersebar di 13 desa di Kecamatan Pagerbarang.

### **3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan Pagerbarang terhadap suksesnya Pendidikan Wajar 9 Tahun**

#### **a. Panggilan Hati dalam Mensukseskan Wajar 9 Tahun**

Geliat pendidikan ini juga dapat ditandai dengan respon masyarakat Pagerbarang terhadap lembaga partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Keberadaan lembaga partisipasi masyarakat berbentuk Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah/Madrasah (KS/M), menurut UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Pagerbarang Any Tristiani, MM, menyatakan bahwa keberadaan lembaga Pendidikan tingkat dasar dan menengah tersebut di Pagerbarang sudah ada sejak tahun sebelum kemerdekaan. Keberadaan lembaga ini jauh sebelum kepmendiknas No.044/U/2002 tentang keberadaan DP dan KS/M itu turun. Jadi masyarakat Pagerbarang menurut seksi sub Pendidikan ini, memiliki partisipasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Respon ini menunjukkan bahwa masyarakat Pagerbarang sangat peduli dan respek terhadap pendidikan, terutama keberadaan lembaga partisipasi masyarakat. Keberadaan lembaga partisipasi masyarakat di kota Pagerbarang, menurut Suyitno, berjalan efektif, terutama pada sekolah-sekolah negeri. Sementara untuk sekolah-sekolah swasta belum berjalan secara maksimal, karena kebanyakan masih terbentur dengan pihak-pihak yayasan. Hal ini dapat di maklumi karena tidak semua yayasan dapat menerima fungsi-fungsi kontrol dari luar sistem. Indikator bahwa lembaga partisipasi masyarakat berbentuk DP dan KS/M efektif, menurut Suyitno dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: (1) laporan-laporan dari masing-masing pengurus (DP/KS/M) ke

Dinas Pendidikan UPTD Dikpora Kecamatan Pagerbarang; (2) setiap tahun sekali ada kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kec Pagerbarang yang diikuti oleh pengurus Komite Madrasah/Sekolah, dengan agenda pokok, sering program kerja KS/M; (3) di Pagerbarang, terdapat juga sekolah dengan partisipasi masyarakat tinggi diantaranya adalah MTs Yaspi, MTs Darussalam, Mts IPTEK, MTs Al Qudussalam, MI meliputi MI Darul Ulum berdiri tahun 1942, MI Darussalam berdiri tahun 1944, MI Asy Syalafiyah Randusari tahun 1954, MI Miftahul Ulum Rajegwesi, SMP Negeri 1, SMP Megeri 2, dan termasuk madrasah-madrasah Diniyah Wustho.

Diantara sekolah-sekolah tersebut ada yang sudah mendapatkan fasilitas penunjang untuk KS/M dari pemerintah pusat, yaitu MI Darussalam Karanganyar. Sementara untuk KS/M di madrasah, kasi Mapenda Kemenag Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa KS/M itu adalah mitra madrasah, dan komite bertanggung jawab terhadap sekolah, tidak bertanggung jawab terhadap Kementerian Agama. Di samping itu di Pagerbarang juga terdapat pemerataan pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah pada setiap kecamatan dan kelurahan cukup mengembirakan.

Ada 4 buah MTs dan 4 buah MI semuanya swasta yang dibiayai oleh swadaya murni masyarakat dengan mengandalkan sumberdaya Zakat Infak dan shadakah dari masyarakat yang dihimpun Yayasan.

b. Dinamika Pendidikan Islam (MI dan MTs) di Kecamatan Pagerbarang

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam di bawah binaan Kementerian Agama, perlu mendapatkan perhatian khusus dari elemen masyarakat Muslim. Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengelola pendidikan umat tampaknya kurang mampu menggerakkan potensi sumber daya umat melalui zakat, infaq, dan shodaqah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Sehingga jika kita hanya menunggu Kementerian Agama maka wajah pendidikan Islam tidak akan pernah berubah. Untuk itu perlu adanya lembaga partisipasi masyarakat yang menggerakkan potensi sumber dana yang dimiliki oleh orang tua siswa dan masyarakat luas.

Terdapat perbedaan yang tajam antara kedua lembaga tersebut. Dari segi administrasi misalnya, jika di Dinas Pendidikan Pagerbarang tercatat dengan jelas dan rapi sistem keadministrasian pendidikan, terutama dinamika pendidikan Pagerbarang dari tahun ke tahun dalam bentuk profil pendidikan Pagerbarang. Sementara di Kementerian Agama bagian pendidikan (MAPENDA) terjadi hal yang sebaliknya. Jangankan data tentang profile lembaga pendidikan Islam di Pagerbarang, data yang terpajang pada dinding ruang MAPENDA adalah data tahun 2010/2011. Sungguh menyedihkan.

Kementerian Agama diharapkan bukan hanya mengurus masalah Haji dan Zakat, agar dua lembaga ini betul-betul dikelola secara profesional. Jika dana abadi haji, zakat, infaq, dan shodaqah ini dikelola

secara profesional, akuntabel, transparan, dan demokratis, dana ini akan mampu memberi jawaban atas kejumudan dan keterpurukan madrasah selama ini di tanah air. Publik kemudian tidak lagi menyetujui pendapat Abdurrahman Wahid atas pembubaran lembaga Kementerian Agama, karena dianggap sebagai ladang korupsi.

Carut marut lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, perlu mendapatkan perhatian khusus dari elemen masyarakat muslim. Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengelola pendidikan umat tampaknya kurang mampu menggerakkan potensi sumber daya umat melalui zakat, infaq, dan shodaqah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Pada hal konsep ini merupakan salah satu potensi besar umat Islam.

Apa yang menyebabkan keterpurukan dunia pendidikan Islam, khususnya madrasah sedemikian rupa, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri non madrasah, apalagi dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan-yayasan pendidikan Katolik? Kenapa sampai terjadi demikian? Apakah Islam sebagai ajaran agamanya yang mempengaruhi, ataukah para pengelola dunia pendidikan Islam (pihak komite madrasah dan madrasah itu sendiri), ataukah memanghegemoni politik, dalam hal aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan madrasah, ataukah juga lembaga Kementerian Agama yang paling bertanggung jawab atas keterpurukan dunia pendidikan Islam, khususnya madrasah? Keterpurukan dunia pendidikan Islam di bawah binaan

Kementerian Agama ini, jika dibandingkan dengan pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, khususnya madrasah di Kecamatan Pagerbarang, dapat dilihat dari hasil temuan Dinas Pendidikan kota Pagerbarang, yang dimuat pada profile pendidikan kota Pagerbarang. Aspek yang dilihat berupa data mutu dan data indikator pelayanan mutu pendidikan antara lembaga pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan dengan lembaga pendidikan Kementerian Agama. Dua lembaga pendidikan, sekolah dan madrasah, terdapat perbedaan yang tajam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama kota Pagerbarang ini, jauh tertinggal dari lembaga pendidikan di bawah binaan UPTD Dikpora Kecamatan Pagerbarang, baik SD/MI-SMA/MA. Hal ini dapat dilihat pada tabel Indikator Mutu Pendidikan dengan noMTsasi atau kategori lulusan, rasio nem, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, dan angka layak mengajar SD/MI & SMP/MTs. Tahun 2011/2012 berikut ini:

Tabel 4.6  
Indikator Mutu Pendidikan SD/MI & SMP/MTs.  
Tahun 2011/2012

No	Indikator	SD	MI	SMP	MTS
1	Lulusan TK/RA	64,5%	35,5%		
2	Rasio Nem Lulusan (mean)	5,79	5,28	5,98	6,30
3	Angka Mengulang	2,49%	2,77%	0,77%	0,34%
4	Angka Putus Sekolah	0,08%	0,06%	0,47%	0,41%
5	Angka lulusan	96,43%	100%	96,51%	98,84%

Berdasarkan mutu masukan 94,54 persen siswa baru tingkat I SD berasal dari tamatan TK lebih besar dari MI. Berdasarkan indikator mutu proses: angka mengulang, putus sekolah, dan angka lulusan, angka mengulaang terbesar pada MI sebesar 2,77 persen, angka putus sekolah terbesar pada SD sebesar 0,08 persen, dan angka lulusan lebih besar SD sebesar 96,43 persen. Dengan melihat indikator mutu proses maka SD lebih unggul. Dilihat dari mutu SDM guru maka guru yang layak mengajar di SD lebih besar. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Untuk SMP dan MTs, berdasarkan mutu masukan pada tabel ini dapat diketahui rasio NEM (Nilai Ebta Murni) lulusan dibanding dengan NEM siswa baru, MTs. Lebih unggul.

Berdasar indikator mutu proses: angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar pada SMP sebesar 0,77 persen, angka putus sekolah terbesar pada SMP sebesar 0,47 persen, dan angka lulus tertinggi MTs. Sebesar 93,36 persen, tapi dilihat dari perbandingan jumlah sekolah SMP 90 dan MTs 24, dari perbandingan ini maka disimpulkan kinerja terbaik adalah SMP. Tidak hanya mutu akademik yang menjadi sorotan dalam penilaian, tapi juga indikator mutu sarana dan prasarana pendidikan pun menjadi bahan perhatian. Hasil studi menunjukkan bahwa aspek sarana dan prasarana madrasah juga jauh tertinggal dari sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel idikator mutu sarana dan prasarana pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berikut:

Tabel 4.7  
Indikator Mutu Fasilitas Pendidikan SD/MI & SMP/MTs.  
Tahun 2011/2012

No	Indikator	SD	MI	SMP	MTS
1	Lulusan TK/RA	64,5%	35,5%		
2	Rasio Nem Lulusan (mean)	5,79	5,28	5,98	6,30
3	Angka Mengulang	2,49%	2,77%	0,77%	0,34%
4	Angka Putus Sekolah	0,08%	0,06%	0,47%	0,41%
5	Angka lulusan	96,43%	100%	96,51%	98,84%
6	Prasarana /Fasilitas				
	Gedung (dari partisipasi)	-	12 lokal	4 lokal	9 lokal
	Perpustakaan (dari partisipasi)		1 unit	-	-
	Mebeleir (dari partisipasi)		4 lokal	2 lokal	7 lokal
	Pendanaan (dari partisipasi)		Ada	Ada	Ada

Indikator mutu prasarana, MI memiliki perpustakaan lebih besar namun MTs lebih kecil, lapangan olah raga lebih besar pada SD dan SMP, Ruang UKS lebih besar pada SD dan SMP, sehingga SD dan SMP lebih memiliki fasilitas itu. Indikator mutu dari aspek biaya, angka partisipasi pemerintah pusat untuk MI dan MTs lebih besar 38,34 persen, dan 38,25 persen. Partisipasi Pemerintah Daerah terbesar 57,01 persen, terbesar pada SD dan untuk SMP 31,83 persen. Partisipasi orang tua siswa terbesar pada MI dan pada MTs, namun pada SD dan SMP lebih kecil. Dengan demikian indikator mutu dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SD/MI dan SMP/MTs. maka dapat dikatakan bahwa SD dan SMP lebih unggul dibandingkan dengan MI dan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, madrasah belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan agama, (2) menggunakan kurikulum yang belum terstandar, (3) memiliki struktur yang tidak seragam, dan (4) memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Menghadapi persoalan ini, langkah pertama dalam pembaruan pendidikan madrasah adalah melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menjadikan madrasah sebagai sekolah negeri, dengan kriteria yang ditentukan pemerintah, di samping mendirikan madrasah negeri baru. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Maksum, 1999: P.132).

Menurut Sumardji (1977) seperti dikutip oleh Maksum (1999: P.132), bahwa peran Kementerian Agama pada awal Orde Baru belum memainkan peran strategis karena ada beberapa alasan, (1) Kementerian Agama masih menjadi titik perbenturan antara kepentingan-kepentingan golongan dalam umat Islam yang masih kental; (2) orientasi pembangunan masih sangat memprioritaskan bidang ekonomi dan fisik sehingga bidang-bidang mental keagamaan masih terabaikan; dan (3) sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, apalagi ditingkat daerah masih lemah

dan kurang mendapatkan dukungan kalangan intelektual dan profesional. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1958 Kementerian agama mengusahakan pengembangan madrasah dengan memperkenalkan model Madrasah Wajib Relajar, yang ditempuh selama delapan tahun. Pendidikan Madrasah Wajib Belajar ini memuat kurikulum pengajaran terpadu antara aspek keagamaan (perkembangan hati/perasaan), pengetahuan umum (perkembangan otak/akal), dan keterampilan (perkembangan tangan/kecekatan).

Namun sampai pada tahap ini madrasah-madrasah di Indonesia tetap saja belum terorganisir dan terstruktur secara seragam dan terstandar (Maksum,1999: P.132).Perkembangan kurikulum pendidikan Islam selama Orde Lama dan OrdeBaru, menunjukkan proses adaptasi dan antisipasi yang tinggi. Menurut Zakiah Daradjat, sekitar tahun 70-an persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Agama Islam (madrasah), diantaranya adalah masalah pengangkatanguru, ijazah, mutu pendidikan dan pengajaran agama. Persoalan-persoalan inikemudian diarahkan untuk menyatuatapkan lembaga-lembaga pendidikan diIndonesia dengan dikeluarkannya Kepres No.34/1972 yang menyatakan bahwasemua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawabKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk lembaga pendidikan Agama.Untuk menyikapi Kepres No.34/1972 tentang penyatuatapan pengelolaan pendidikan tersebut, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan semua madrasah dari tingkat MI sampai MA.

Hasilnya 123 MI di negerikan, sehingga menjadi 358 MTS. Dalam waktu bersamaan telah berdiri 182 MTs. Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, dan Kementerian Agama, melalui Menteri Agama A. Mukti Ali, mengecualikan madrasah, sehingga Kepres No.34/1872 tersebut diatas tidak terlaksana sampai tahun 1974. Namun menurut Zakiyah, Madrasah Ibtidaiyah swasta di daerah diinstruksikan pemerintah daerah setempat untuk menyerahkan gedung madrasah ke SD. Persoalan ini menyulut protes pengelola madrasah swasta dan tokoh pendidikan agama terhadap Kementerian Agama Pusat. Protes ini direspon oleh Presiden Suharto dengan mengeluarkan Inpres No.15/1974 tentang diberlakukannya kembali Kepres No.34/1972 tentang penyatuaapan madrasah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas usul Direktorat Pendidikan Agama kepada Menteri Agama, maka diselenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A), lembaga yang menghimpun para ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia, Kementerian Agama. Pada awalnya sidang MP3A, dilarang membahas Kepres No.34/1972 dan Inpres No.15/1974 oleh pemerintah (c.q Sekjen Kementerian Agama: Kol.B.Rangkuti). Sehingga menyulut kekecewaan peserta, namun Menteri Agama menyatakan bahwa pembahasan Kepres dan Inpres tersebut sejauh memberikan masukan kepada Menteri Agama. Pembahasan ini melahirkan saran agar madrasah tetap berada di bawah Kementerian Agama dan “pendidikan umum” di madrasah disesuaikan dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat” (MI sesuai dengan SD, MTs. sesuai

dengan SMP dan MA sesuai dengan SMA). Hasil ini dilaporkan ke Menteri Agama dan diteruskan ke Suharto. Sehingga lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

Ditetapkan pendidikan umum di madrasah, dimaksudkan agar mutu pendidikan madrasah sama dengan pendidikan umum. Tamatan MI bisa masuk di SMP, tamatan MTS bisa masuk di SMA, dan tamatan MA bisa masuk perguruan tinggi umum, demikian pula sebaliknya. Untuk itu perbandingan jam pelajaran untuk ilmu pengetahuan Umum dan Agama ditetapkan 70% dan 30 %. Pada tanggal 10-20 Agustus 1970 di Cibogo, Bogor, dilakukan penyusunan kurikulum madrasah secara nasional. Hasil dari kurikulum ini diberlakukan secara nasional dengan SK Menteri Agama No.52/1971. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum 1973 dengan ditetapkan SKB 3 Menteri, langkah pendidikan madrasah selanjutnya adalah diarahkan untuk perubahan kurikulum penyesuaian dengan pendidikan umum. Hal ini kemudian berlakunya kurikulum 1976. Kurikulum 1976 inilah awal mulanya mereduksi dikotomi pendidikan Islam ketika itu. Namun bagi yang tidak setuju dengan kebijakan SKB 3 Menteri ini, mengkhawatirkan pergeseran nilai pendidikan madrasah menjadi pendidikan sekuler. Tapi pada akhirnya SKB 3 Menteri ini, kemudian secara perlahan diterima oleh semua kalangan masyarakat Islam. Misalnya di Pondok Pesanren sebelumnya menolak mati-matian, pada akhirnya menerima kurikulum 1976 tersebut. Pada era Menteri Agama di bawah Munawir

Sadzali, untuk meningkatkan mutu, pemerintah menawarkan konsep Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Sementara pada era Menteri Agamanya di bawah Tarmizi Taher menawarkan konsep madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Konsep madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam masih berjalan hingga sekarang. Pada tahun 1990-an sampai tahun 2001/2002, untuk mengantisipasi kompetisi global, madrasah melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Upaya ini dilakukan dengan melalui kerjasama, dengan ADB (*Asian Development Bank*), berwujud BEP (*Basic Education Project*) dan DMAP (*Development Madrasah Aliyah Project*), di samping melalui DIP (Daftar Isian Proyek) dari APBN. Dana ratusan milyar ini, digunakan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan madrasah, baik aspek tenaga kependidikan (kepala madrasah, TU, guru, pengawas, PAI/PPAI dll), pengembangan sarana dan prasarana, bahan-bahan ajar, sumber-sumber belajar, aspek manajemen, maupun kegiatan studi banding keluar negeri dan sebagainya (MuhaiMTs,2006: P.206). Realisasinya sejak tanggal 20-2-1998 ditetapkannya 35 madrasah sebagai madrasah model, pada 26 propinsi di Indonesia dengan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.00./KEP/7.A/98. Hasil kerja sama ini melahirkan dua hal perubahan pada madrasah, yaitu: (1) di setiap madrasah mendirikan lembaga majelis madrasah (yang sekarang diganti namanya menjadi komite madrasah), yang mewadai peran serta masyarakat untuk peningkatan mutu; dan (2) lahirlah madrasah unggul atau sering disebut dengan madrasah

model. Pada era reformasi, pemerintahan melalui Presiden BJ. Habibie pada tanggal 7 Mei 1999 mengeluarkan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Otonomi Daerah (Otda). Implikasi dari pemerintahan otonomi adalah memberikan harapan baru bagi pendidikan nasional khususnya bagi madrasah. Selama Orde Baru kebijakan pendidikan bersifat *sentralistik* atau *top down*, maka pada orde reformasi kebijakan pendidikan bersifat *desentralistik* atau *bottom up*.

c. Visi-Misi MTs Mendorong tumbuhnya Partisipasi Masyarakat Pagerbarang

Secara filosofis MTs di wilayah Kecamatan Pagerbarang memiliki landasan epistemologi Islam yang kuat. Artinya MTs Swasta yang berada di Kecamatan Pagerbarang dalam kurikulumnya dibangun atas konsep ilmu Qur'ani, yaitu konsep ilmu yang memiliki nilai-nilai wahyu yang digali dari ayat ayat kauniyah dan kauliyah. Epistemologi ilmu yang dibangun tidak hanya *rasionalitas-aqliyah*, tapi juga aspek *spiritual-ruhiyah*, atau juga disebut dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ). Hal ini sebagaimana disebut oleh kepala MTs IPTEK Sidomulyo Kec Pagerbarang Hamami, S.Ag mengatakan bahwa:

*"Bahwa MTs IPTEK Sidomulyo Kec Pagerbarang mengupayakan warga madrasah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk perilaku seluruh warga madrasah (perilaku siswa, guru, pegawai administrasi) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping itu juga, perilaku budaya organisasi, budaya sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw."*

Landasan filosofis MTs IPTEK Sidomulyo Kec. Pagerbarang ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan visi dan misinya.

Visi madrasah: "*Terwujudnya madrasah berstandar nasional yang handal dan Islami*"; dan misi madrasah, (1) *menciptakan suasana madrasah yang Islami, (2) menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan berwawasan teknologi, (3) menciptakan sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif, dan kooperatif dengan mengembangkan multi kecerdasan, (4) menjadikan lingkungan madrasah sebagai sumber belajar, dan (5) membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya masyarakat dibidang pendidikan.*"  
( Wawancara Kepala MTs IPTEK, 9 Oktober 2012).

Pada kalimat visi MTs IPTEK Kec Pagerbarang, terdapat pernyataan, "terwujudnya madrasah berstandar nasional yang handal dan Islami". Mengenal hal ini, Kepala Madrasah Hamami menjelaskan bahwa, ada tiga kata kunci, dalam pengelolaan dan pengembangan Madrasah yang terdapat dalam visi MTs, yaitu berstandar nasional, handal, dan Islami.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Madrasah Islami sebagai visi MTs Darussalam Karanganyar Pagerbarang menurut Kepala MTs Syeful Bahri, M.Pd adalah:

*Wujud madrasah Islami yang dimaksudkan dalam visi MTS Pagerbarang I tersebut adalah membentuk perilaku seluruh warga madrasah (perilaku siswa, guru, pegawai adMTsistrasi) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping itu juga, perilaku budaya organisasi, budaya sekolah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw ( Wawancara Kepala MTs Darussalam, 12 Oktober 2012).*

Visi-misi MTs Darussalam Karanganyar Kec Pagerbarang ini, tidak hanya wacana dan pajangan disetiap sudut-sudut ruang. Namun telah embuktikan dirinya melalui perjuangan panjang sejak keberadaan kelahirannya dari pesimisme "partisipasi rendah" hingga optimisme "partisipasi tinggi". Karya nyata MTS Pagerbarang I telah merubah

MTsimal dua citra madrasah. *Pertama*, citra pendidikan Islam dikotomis. Mts Darussalam Karanganyar Kec Pagerbarang hadir dengan dua wajah atau model pendidikan Islam yang tidak membedapisahkan (*dikotomis*) antara ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana pemahaman kebanyakan umat Islam. *Kedua*, menepis citra madrasah termarjinalkan, jumud, dan berbagai bentuk padanan istilah lainnya, dari sekolah nomor dua atau sekolah tempat persinggahan terakhir setelah di sekolah negeri non madrasah tidak diterima, menjadi sekolah unggul. Keunggulannya dapat dilihat dari hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan kualifikasi (B) di samping prestasi-prestasi akademik dan nonakademik lainnya. Implementasi dari visi ini dapat dilihat dari berbagai inovasi-inovasi pengembangan kurikulum yang diterapkan di MTs Darussalam Karanganyar Pagerbarang, yaitu:

*Bagi siswa: (1) pada tahap seleksi penerimaan siswa baru untuk kategori agama siswa harus memiliki kemampuan membaca al-Qur'an, hafalan surah pendek, dan hafalan do'a harian; (2) pada muatan kurikulum terdapat mata pelajaran pendukung seperti: Qur'an Hadits, Aqida Akhlak, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqh; (3) tiada hari tanpa mengaji (30 menit untuk kelas 1 dan 2, 15 menit untuk kelas 3-6 sebelum pelajaran dimulai; (4) program pembiasaan: sholat dhuha, dzuhur, dan Jum'ad bersama, mengaji, berperilaku mulia, dan gemar membaca; (5) memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan lancar dan benar pada tahun keempat; (6) memiliki kebiasaan melaksanakan sholat lima waktu secara tertib; dan (7) memiliki kemampuan menghafal 25 surah pendek dan 10 hadits. Bagi guru dan pegawai adMTsistrasi: (1) pada tahap seleksi rekrutmen guru dan tenaga kepegawaian, guru dan pegawai harus memiliki kemampuan mengaji atau membaca al-Qur'an; (2) meningkatkan kemampuan guru dan karyawan dalam membaca al-Qur'an; (3) mengaji bagi seluruh pegawai admistrasi setiap hari 15 menit dari pukul 06.30 (Wawancara, Syaepul Bahri, 12 Oktober 2012)."*

Aspek agama ini hampir oleh seluruh orang tua siswa sebagai faktor utama mendorong orang tua siswa menyekolahkan anaknya di MTs Kecamatan Pagerbarang di samping aspek-aspek lainnya. Hal ini sebagaimana penuturan orang tua siswa Anum (dari Mts Darussalam Karanganyar):

*"Alasan saya menyekolahkan anak di MTs Darussalam ini adalah sebagai Ibu ingin membentengi diri dari penyakit-penyakit masyarakat, lingkungan, dan lainnya. Sehingga alasan utama adalah alasan Agama. Dengan memasukkan anak di MTs kita tidak perlu lagi memberikan les tambahan di luar sekolah baik les umum dan les ngaji. Kita sudah terima beres. Anak saya sudah diterima di SMPN 1 Pagerbarang, tapi ketika anak saya disuruh memilih, dia memilih MTs Darussalam Kec Pagerbarang. Harapan untuk MTs Darussalam, kedepan lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal keagamaannya, misalnya hafalan do'a-do'a dan surah-surah pendek dalam al-Qur'an (wawancara, 11,08,2012)."*

Selain itu pula hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat Desa Mulyoharjo, Khalimi (mantan Kades) tentang apa yang mendorong masyarakat untuk membantu pendanaan dalam pendidikan di MTs Al Qudusussalam? Jawaban Khalimi sebagai berikut:

*"Masyarakat Mulyoharjo pada dasarnya gemar beribadah, niat ibadah itulah mereka senang untuk berderma seperti dari panitia pembangunan gedung madrasah Tsanawiyah yang membutuhkan dana pembangunan mereka tidak sungkan-sungkan, karena apa, menurutnya amal jariyah itu pahalanya selalu mengalir" (wawancara, 15 oktober 2012).*

Menurut KH Nawawi, Tokoh Ulama Kedungsugih pada saat ditanya tentang pembangunan swadaya Mts YASPI (Yayasan pendidikan Islam) Kedungsugih Kec Pagerbarang Kabupaten Tegal, dijelaskan bahwa, *MTs itu ladang akherat. Sekolah atau madrasah perlu*

*diperhatikan, jika madrasahnya bermutu maka hasilnya bagus, jika madrasahnya jelek maka hasilnya jelek. Jika madrasah jelek maka musha masjid, dan ulama-ulama tidak akan muncul. Masyarakat Kedungsugih menyadari akan pentingnya madrasah Tsanawiyah maka meskipun musim kemarau, bila ada panitia pembangunan dari pihak sekolah MTs ya....pasti memberi meskipun berjanji kepada panitia....!(wawancara KH Nawawi Kedungsugih, Pagerbarang, 17 Oktober 2012, pukul 10.00 wib-11.30 wib).*

Berdasarkan hasil wawancara beberapa tokoh Desa yang terdapat MTs dan SMP tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa niat dari pemuka agama, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, melengkapi fasilitas pendidikan, pendanaan operasional madrasah merupakan diniati sebagai amal ibadah karena ketertarikan dengan visi dan misi serta keprihatinan terhadap pentingnya pendidikan samoai wajar 9 tahun.

d. Strategi dan Pola Kerja MTs Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Wajar 9 tahun

Sebelum berupaya untuk menarik dukungan masyarakat luas agar berpartisipasi terhadap MTs dan SMP di Kecamatan Pagerbarang, MTs Kecamatan Pagerbarang melakukan berbagai strategi dan upaya membenahi internal sekolah untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Upaya ini dilakukan untuk menarik dukungan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di MTs Kec Pagerbarang , dengan target masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi. Dengan mengharapkan orang tua siswa yang berkemampuan secara ekonomi ini, setidaknya akan memberikan dampak positif, terutama pada peningkatan partisipasi finansial. Karena di erah

otonomi dan penerapan MBS pada sekolah, sekolah dituntut harus lebih kreatif dan inovatif mencari dana secara mandiri untuk membiayai sekolah.

Hasil Wawancara dengan Hamami, S.Ag., Kepala MTS IPTEK Hubul Waton Bapak Hamami,S.Ag tentang upaya yang dilakukan untuk menarik partisipasi masyarakat terhadap sukses wajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang. Untuk mewujudkan cita-cita seperti tersebut di atas, MTs IPTEK di Kec Pagerbarang melakukan berbagai langkah dan strategi. Langkah-langkah dan strategi ini disebut sebagai elemen sukses. Hal ini dapat dilihat dalam profile MTs Pagerbarang , tentang faktor-faktor keberhasilannya, Minimal ada lima poin yaitu: (1) kesungguhan dan kedisiplinan. Hal ini diberikan contoh oleh Kepala Madrasah untuk hadir pertama kali dengan memberikan ucapan selamat datang kepada siswa, guru, dan karyawan yang datang. Jika pemimpinnya lebih awal datang, tentunya akan memberikan beban psikologis bagi guru dan stafnya datang tidak tepat waktu. Bahwa kedisiplinan bukanlah sesuatu yang diteorikan tapi wujud nyata yang dicontohkan. Tidak hanya bagi kepala madrasah, kedisiplinan juga diterapkan bagi guru untuk memenuhi target-target proses pembelajaran sesuai dengan program dan juga disiplin organisasi, semua pendidik dan tenaga kependidikan bahkan peserta didik pun harus mematuhi disiplin organisasi. Siswa yang terlambat misalnya, harus diterapkan disiplin organisasi, dan disiplin organisasinya pun mendidik, seperti mengaji atau ikut senam, tutur seorang guru. Di samping itu ada hal lain yang menarik, ketika peneliti bersama-sama menunaikan sholat Zhuhur berjama'ah di

Masjid al-Falah, siswa-siswi ini berjejer lurus dan antri menunggu giliran berwudhu. Ketika dalam Masjid, suasananya pun menjadi hening, tertib, dan teratur; (2) dukungan wali murid atau partisipasi orang tua siswa. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, yang lebih besar, ada dua strategi yang dilakukan, Hal ini seperti dinyatakan oleh koordinator Humas, Ali Fathoni, bahwa untuk mendapatkan partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa yang lebih besar, di Mts IPTEK terakomodasi pada dua lembaga yaitu Komite Sekolah/Madrasah (KS/M) dan Paguyuban Orang Tua Siswa (POS). Kedua lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan madrasah MTs IPTEK Mulyoharjo Kec Pagerbarang ; (3) lingkungan dan layanan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan cermin sikap tanggung jawab. Pelayanan yang optimal tetap perlu diberikan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bukan sekolah yang eksklusif, melainkan sekolah yang open manajemen; (4) prestasi. Salah satu strategi yang terpenting, yang dilakukan oleh MTS Pagerbarang I untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk menyekolahkan anaknya hingga sekarang adalah aspek prestasi madrasah. Prestasi yang ingin diwujudkan MTS Pagerbarang , tidak hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi non akademik. Untuk prestasi akademik, MTS Pagerbarang dapat mewujudkannya dengan prestasi yang mengembirakan. Prestasi-prestasi yang dicapainya melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah sebagai standar nasional. Sementara untuk prestasi non akademik, juga menjadi tujuan lembaga ini, baik di tingkat kota, propinsi, nasional, maupun

internasional. Bukan rahasia umum lagi, MTs tidak hanya mewujudkan prestasi akademik tapi juga non akademik. Hal ini ditandai dengan beribu hiasan dinding kiri dan kanan sebelum masuk ruang kepala sekolah dipenuhi oleh trophy-trophy.

Azam misalnya sebutan bagi seorang siswa kelas VII Mts IPTEK Sidomulyo Kec Pagerbarang , ini saja sudah mampu memecahkan rekor 25 piala selama di MTs IPTEK. Belum yang lain-lainnya. Prestasi-prestasi ini cukup banyak yang diperoleh peserta didik MTs IPTEK Hubul Wathon Sidomulyo Kec Pagerbarang

Disisi lain Khaerul Humam, dari MTs Darussalam Karanganyar, siswa kelas IX selama 3 tahun telah memboyong pila sebanyak 29 piala baik karya tulis, puisi, maupun seni dan olympiade matematika dan IPA. Bagi MTs Yaspi Kedungsugih, prestasi-prestasi ini tidak hanya satu bidang yang diperlombakan, tapi juga hampir seluruh jenis bidang perlombaan diikuti oleh siswa-siswi MTs Darussalam Kec Pagerbarang. Mulai dari karawitan, tarik suara, fashion, pidato, melukis, menari, mengarang, hingga pesta-pesta olympiade sains matematika dan IPA. Namun pada tabel berikut dimasukkan tingkat nasional dan internasional saja: Prestasi ini, kemudian mendorong partisipasi orang tua siswa terhadapnya; dan (5) ridho dari Allah. Selain usaha bersifat manajerial, keberadaan MTS Pagerbarang I sekarang ini juga lebih dikarenakan fadlol dari Allah SWT.

Berbeda dengan SMP Negeri 1 Pagerbarang sebagai Lembaga Pendidikan Negeri yang dibiayai pemerintah maka partisipasi masyarakat

terbatas pada bantuan sarana dan prasarana sekolah seperti meja-kursi dan alat-alat pelajaran. Melalui komite sekolah SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pagerbarang mengerahkan partisipasi masyarakat dalam bentuk menarik sumbangan pendidikan untuk membiayai kegiatan ekstra kurikuler dan pemenuhan sarana prasarana sekolah berkaitan dengan buku dan alat peraga.

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa elemen-elemen sukses MTs di kecamatan Pagerbarang ini dapat diklasifikasikan secara teoritis menjadi empat unsur sistem. Unsur sistem ini yang mempengaruhi kinerja lembaga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS. Era Orde Baru misalnya, ada tiga faktor dalam sistem yang mewujudkan pendidikan nasional, yaitu (1) manajemen sebagai faktor upaya; (2) organisasi sebagai faktor sarana; (3) administrasi sebagai faktor karsa (Tilaar, 1994: P.7); dan (4) kepemimpinan sebagai faktor penggerak. Untuk mengurai kesuksesannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah secara teoritis dalam tulisan ini dibagi dalam dua bagian besar. Yaitu elemen-elemen sukses internal dan eksternal. Untuk elemen sukses internal terdiri dari: (1) manajemen; (2) organisasi; (3) administrasi; dan (4) kepemimpinan. Sementara untuk faktor eksternal terdiri dari: (1) pemerintah; (2) masyarakat; dan (3) sistem budaya.

#### **5. Faktor Internal Tumbuhnya Partisipasi terhadap Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Pagerbarang**

Ada empat faktor atau elemen sukses internal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun terutama dalam mensukseskan kelestarian

MTs Swasta di kecamatan Pagerbarang, elemen-elemen tersebut adalah: (1) manajemen; (2) organisasi; (3) administrasi; dan (4) kepemimpinan. Manajemen Pengelolaan Salah satu indikator keberhasilan sebuah lembaga modern adalah aspek manajemen. Aspek manajemen modern yang dikembangkan dalam sebuah lembaga dibelahan dunia dewasa ini adalah menerapkan sistem *Total Quality Manajemen* (TQM). Edward Sallis (2006: P.58-59) menyebutkan bahwa TQM merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Dalam TQM terdapat tiga gagasan tentang mutu, yaitu: (1) kontrol mutu (*quality control*); (2) jaminan mutu (*quality assurance*); dan (3) mutu terpadu (*total quality*).

Hasil temuan menunjukkan MTS Pagerbarang dalam manajemen pengelolaan madrasah menerapkan sistem TQM. Aspek kontrol mutu (*quality control*) pada MTS Pagerbarang dapat ditandai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama komite madrasah dalam melakukan fungsi kontrol (*controlling*) dan supervisi terhadap kualitas *in put*, *proses*, dan *out put*.

Aspek jaminan mutu (*quality assurance*) pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Pagerbarang dapat ditandai dengan adanya jaminan kualitas *in put* siswa, kepala sekolah, guru, dan pegawai dan jaminan kualitas proses dengan menerapkan standar minimal nasional. Agar sistem ini tetap berjalan sesuai fungsi manajemennya masing-masing dan ada jaminan mutu sekolah, MTs kecamatan Pagerbarang juga melakukan pelatihan dan workshop *Quality Assurance Manajemen System* pada hari Sabtu tanggal 6 September 2012

dibiayai dari Kementerian Agama Kabupaten Tegal dengan tujuan untuk memahami penjaminan mutu sekolah dan pengajaran dengan berdasarkan sistem yang telah ditentukan.

Bentuk yang lain menurut Pengawas MTs Kabupaten Tegal yaitu Abdus Somad, M.Ag menjelaskan bahwa MTs di Kecamatan Pagerbarang sering mengadakan kegiatan pelatihan atau pembinaan melalui MGMP dilakukan setiap hari Sabtu.

Aspek mutu terpadu (*total quality*) dapat ditandai dengan semua system yang ada dalam MTS Pagerbarang I kualitas *in put* siswa, kepala sekolah, guru, pegawai, komite, POS, pemerintah dan lingkungan mendukung sesuai fungsi dan peran masing-masing secara efektif dan efisien. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Majelis Pendidikan Madrasah (MAPENDA) Kantor Kementerian Agama Kab Tegal dan ketua komite Mohammad Shaleh. Untuk POS, salah seorang ketua POS menyatakan bahwa POS sangat efektif untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, TQM ini dapat pula dilihat pada penerapan MBS. Wujud konsep MBS adalah adanya pelibatan *stakeholders* dalam pengelolaan sekolah. TQM dalam MBS merupakan upaya untuk memenuhi standar nasional pendidikan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah bahkan melampauinya.

Keberhasilan Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Pagerbarang dalam menarik partisipasi masyarakat baik segi finansial, maupun pemikiran dan dukungan moril terhadap eskistensi MTs dalam mengentaskan Wajib

Belajar 9 tahun, maka salah satu Kepala MTs yang diwawancarai adalah Hamami, S.Ag kepala MTs IPTEK Hubul Wathon Sidomulyo Kec Pagerbarang Kabupaten Tegal, menjelaskan bahwa:

*"Wujud MTs IPTEK Sidomulyo Kec Pagerbarang yang mengimplementasikan pengelolaan pendidikan sesuai dengan amanah konstitusi yang dituangkan dalam PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada BabII, pasal 2 meliputi 8 standar: standar Isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian." (Wawancara, Hamami, Oktober 2012).*

*Pertama*, standar isi. Aspek ini, pada MTS Pagerbarang , menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan PP No.19/2006, dan untuk mencapai visi-misi dan tujuan MTS Pagerbarang, maka diperlukan inovasi-inovasi di bidang kurikulum dan pembelajaran. Inovasi-inovasi kurikulum tersebut meliputi:

- (1) tiada hari tanpa mengaji (30 menit untuk kelas 1 dan 2, 15 menit untuk kelas 3-6 sebelum pelajaran dimulai;
- (2) penilaian berbasis kelas dengan didukung sistem aplikasi komputer;
- (3) guru kelas (1-3) dan guru bidang studi (4-6);
- (4) acak kelas (sistem heterogen) setiap tahun,
- (5) program pembiasaan: sholat Dhuha, Zhuhur, Istighotsah, mengaji, berperilaku mulia, dan gemar membaca;
- (6) kriteria ketentuan Minimal 7,5 dan dilakukan peninjauan ulang setiap tahun;

- (7) bimbingan sukses UNAS (Ujian Nasional) untuk siswa kelas VI dan IX serta *Remedial Teaching* untuk siswa yang lamban belajar, dan
- (8) alokasi waktu pada kalender pendidikan: Minggu efektif belajar 34 Minggu dan maksimum 38 Minggu, jeda tengah semester maksimum 1 Minggu, jeda antar semester maksimum 2 Minggu, dan libur akhir tahun pelajaran maksimum 2 Minggu.

Untuk meningkatkan kualitas standar isi, berbagai upaya inovasi kurikulum dilakukan. Inovasi dilakukan dalam bentuk partner atau kerja sama baik lokal, nasional, maupun internasional.

*Kedua*, standar proses. Pada aspek ini, tidak hanya peserta didik, tapi juga pendidik dan tenaga kependidikan diharuskan memenuhi standar ini. Standar proses pada peserta didik, misalnya: MTS Pagerbarang I menerapkan pembelajaran dengan pendekatan PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) yang berbasis CTL (*Contextual Teaching and Learning*) dengan dilengkapi multimedia sistem aplikasi komputer. Pendekatan ini terbukti efektif. Indikatornya dapat dilihat dari daya serap siswa, kualitas *out putnya*, dan juga dari respon peserta didik terhadap proses belajar di MTS Pagerbarang . Hasil temuan menunjukkan bahwa semua peserta didik merasa senang dan enjoy mengikuti proses belajar mengajar. Jenis kesenangan terhadap proses belajar mengajar berbeda-beda, ada yang senang dengan pelajaran matematika, ada juga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan ada juga bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya. Jenis kesukaan ini tergantung pada daya tarik mereka terhadap guru

dan kemampuan mereka memahami mata pelajaran tertentu. Anisa misalnya, siswa kelas 4 ini menuturkan, Ia lebih senang dengan pelajaran matematika, dan gurunya ramah dan baik. Anisa menginginkan tugas rumah ditambah agar di rumah tidak banyak main dan nonton TV. Standar proses pada guru dan karyawannya, Ali Fathoni menyebutkan bahwa pada hari Jum'at digunakan untuk rapat evaluasi proses belajar mengajar dan tantangantantangan yang dihadapi MTs IPTEK Kec Pagerbarang serta agenda-agenda lainnya yang mengarah pada peningkatan mutu, dan pada hari Sabtu digunakan untuk pemberdayaan peningkatan SDM, diikuti olah pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya pada hari sabtu, 19 Juli 2012, MTs se Kecamatan Pagerbarang menyelenggarakan "Pelatihan Standar Proses di Aula MTs Darussalam Karanganyar Kec Pagerbarang . Pelatihan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar proses Minimal yang ditetapkan. Standar proses pada MTs ini tidak hanya sekedar teoritis penerapan kebijakan, tapi standar yang diterapkan secara totalitas sesuai standar *quality proses*. Unsur-unsur dalam standar ini adalah: kualitas standar input: guru, siswa, sarana pembelajar yang seimbang. Misalnya *quality standar input* guru, ditentukan melalui seleksi yang memenuhi standar proses.

Tidak hanya siswa, guru, dan karyawan, orang tua siswa juga diberikan tugas khusus untuk mengontrol putra-putrinya pada saat jam di luar sekolah. Strategi yang digunakan untuk mengontrol aktivitas peserta didik di luar sekolah adalah dengan menerapkan kontak kendali siswa. Di sini bagi orang

tua yang menyadari pentingnya peran orang tua memberikan pendidikan di rumah dan pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap pembentukan karakter dan sikap anak, maka ini akan di respon positif. Bagi orang tua siswa yang kurang menyadari hal ini dan kurang peduli pendidikan keluarga, maka kontrol siswa ini dianggap terlalu membebani anak.

*Ketiga*, standar kompetensi lulusan. Pada (pasal 25:2) kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, Standar kelulusan, MTS Pagerbarang I telah melampau standar Minimal yang ditetapkan pemerintah pada setiap periode kelulusannya. Pada tahun 2012/2013 nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran sebesar 8,20, pada tahun 2011/2012 nilai rata-rata 8,23, dan tahun 2011/2012 nilai rata-ratanya 8,54. Pasal 26: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan hidup mandiri, pada MTS Pagerbarang I dengan program pembiasaan: sholat Dhuha, Zhuhur, dan Jum'at bersama, mengaji, berperilaku mulia, dan gemar membaca. Di MTS Pagerbarang I ini juga, ada siswa yang melampau target pencapaian sekolah dalam hal menghafal surah-surah pendek. Ada siswa yang sudah menghafal juz ketiga puluh (juz 'Amma). Sementara untuk dapat melanjutkan pendidikan lebih lanjut, lulusan (*out put*) 100 persen terserap ke seluruh sekolah SMA/MAN di dalam maupun luar Kecamatan Pagerbarang. Dan hampir semua siswa khususnya sudah siap-siap dan menentukan pilihan ke sekolah mana yang mereka harus meneruskan. Reza, misalnya siswa kelas IX menyebutkan insya Allah nanti kalau lulus, saya masuk di SMA

Negeri 1 Slawi, ya, kalau diterima. Sekolah negeri non madrasah yang dikenal sebagai sekolah standar internasional. Namun tidak semua siswa seperti Reza. Ada juga siswa yang memilih meneruskan di MAN Babakan Kab Tegal, dengan alasan kakak tingkat dan teman-temannya banyak yang masuk di MA Negeri Babakan dan MAN 1Pagerbarang. Ada juga siswa yang enggan berkomentar, tunggu lulus dulu baru menentukan pilihannya. Standar kelulusan MTs dan SMP di Kecamatan Pagerbarang dapat dilihat dari pencapaian ujian akhir kelas 6 pada setiap tahunnya, yaitu UAM/UPM dan UASBN.

*Keempat*, standar pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 28: 3 kompetensi guru). Untuk memenuhi standar Minimal pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen guru atau staf administrasi melakukan seleksi dengan beberapa tahap: (1) seleksi akademik S1, IP : 3,30 (PTS) dan 3,00 (PTN); (2) interview; (3) kemampuan komputer; (3) kemampuan mengaji; dan (4) micro teaching selama 1 Minggu. Standar kompetensi lulusan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat berikut, jumlah gurunya 100% S1. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja guru yang lebih profesional, telah melakukan pembinaan guna meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran (*instructional technology*), dan kemampuan guru dan karyawan dalam membaca al-Qur'an. Di samping itu juga melakukan pemberdayaan

personalia dengan melalui: (1) *in service education*, (2) *in service training*, dan (3) pembinaan kedinasan.

*Kelima*, standar sarana dan prasarana (pasal 42:1). Untuk menunjang proses belajar mengajar berstandar nasional, juga memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional yaitu: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan). Madrasah tsanawiyah IPTEK ini memiliki 10 ruang kelas dan murid 303 siswa serta jumlah guru dan karyawan 12 orang (22 guru). MTS IPTEK, juga memiliki lahan kebun, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang laboratorium (laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium matematika, laboratorium komputer, laboratorium IPS/PPKN, laboratorium seni), ruang UKS, kantin, instalasi daya dan jasa, lapangan olah raga, mushollah, tempat bermain, kolam renang, tempat rekreasi dan ruang atau tempat lain yang menunjang. Pada standar ini, sebagai kepala madrasah, Abdul Mughni, ingin mewujudkan sarana dan prasarana sesuai standar nasional. Program prioritas pada standar ini adalah menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah dengan strategi menambah koleksi buku dan menata lingkungan.

Pada perpustakaan misalnya, menurut koordinator perpustakaan, Puji Astuti, setiap tahun koleksi perpustakaan selalu meningkat. Pada tahun 2010/2011 koleksi perpustakaan berjumlah 8.884 eksemplar, sementara

pada tahun 2011/2012 jumlah koleksi sudah mencapai 14.731 eksemplar. Dan ini akan ditambah setiap tahunnya. Untuk penataan lingkungan pada tahun anggaran 2011/2012, Hamami telah merealisasikannya berupa perbaikan *green house*, laboratorium matematika dan multi media, ruang guru, MCK, ruang perpustakaan dan sarana kelas.

*Keenam*, standar pengelolaan (pasal 49:1). MtS IPTEK , Mts Darussalam, MTs Yaspi dan Al Qudusussalam menerapkan konsep MBS. Wujud dari konsep MBS adalah adanya lembaga partisipasi masyarakat atau KS/M di MTS yang berjalan secara efektif sesuai fungsi dan tugasnya. Di samping partisipasi melalui Komite Sekolah, MTs juga menggalang partisipasi melalui Paguyuban Orang Tua Siswa (POS) dan jaringan alumni. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas terhadap sekolah. Sistem pengelolaan dengan menerapkan TQM. Agar sistem ini tetap berjalan secara efektif dan efisien, MTs mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung standar pengelolaan ini. Diantara kegiatan tersebut adalah mengadakan pelatihan *Quality Assurance Manajemen System* kerja sama dengan STAIBN, pada hari Sabtu, 6 September 2012 di Aula MTs IPTEK yang diikuti oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 4 MTs. Menurut salah satu trainer Badrodin MSI, bahwa prinsip dasar sistem manajemen adalah mutu adalah *leadership, customer satisfaction, employee empowerment dan involment, continuous proses improvement, supplier patnership, dan performance*

*measures*. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pendidikan sampai SLTP atau Wajar 9 Tahun dapat digerakan.

*Ketujuh*, standar pembiayaan (pasal 62:1). Untuk menjaga dan mendorong etos dan produktivitas kinerja civitas akademika (satuan pendidikan), MTs di kecamatan Pagerbarang melakukan pembiayaan sesuai standar MTsimal yang telah ditetapkan pemerintah. Target kepegawaian yang ingin dicapai Mts, misalnya berupaya meningkatnya kesejahteraan warga madrasah. Sistem penggajian bagi GTT/PTT di Mts belum menyesuaikan sistem penggajian pegawai negeri tetapi kenaikan pangkat sesuai PNS. Apabila sampai purna tugas sudah dipersiapkan dana pesangon. Untuk dana purna tugas ini, di samping mendapatkan informasi dari guru-guru, dan dokumen dokumen Mts di Kecamatan Pagerbarang , peneliti juga mendapatkan dari ketua komite, M. Sholeh dari MTs Qudusus Salam, Ia membenarkan hal tersebut. Menurutnya, komite telah berhasil mengumpulkan dana yang hampir mencapai puluhan juta. Dana tersebut disisihkan dua ribu rupiah dari infaq siswa setiap bulannya. Agar tercapainya target tersebut, maka MTs Qudusus salam tidak hanya mengharapkan sumber pendanaan melalui bantuan pemerintah (BOP, dan BOS), iuran pendidikan siswa setiap bulan, dan dana pengembangan pendidikan siswa baru dan pindahan. Di samping itu juga, MTs berupaya mendapatkan dana melalui dana syukuran kenaikan kelas, amal Jum'at siswa, dan zakat mal, infaq, shodaqoh orang tua siswa dan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat

yang lebih besar, MTs IPTEK Kec Pagerbarang dalam target bidang keuangan mengupayakan: (1) terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; (2) meningkatkan sumber pendanaan madrasah selain dari anggaran negara (APBN/APBD); dan (3) dalam manajemen keuangan dilakukan dengan berpedoman pada: (a) RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah) yang dibuat setiap tahun berdasarkan kebutuhan Mts IPTEK Pagerbarang ; (b) laporan keuangan tiap akhir tahun pelajaran kepada seluruh orang tua siswa; dan (c) mengadakan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh KS/M di akhir masa jabatan ( tiap 3 tahun sekali).

Indikator transparansi dan akuntabel keuangan, secara formal melaporkan seperti tersebut di atas, tapi juga dilaporkan secara non formal kepada seluruh *stakeholders* atau siapaun bisa mendapatkan informasi tersebut melalui Selebaran dan pengumuman. Sementara itu, untuk mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap MTs Yaspi Kedungsugih Pagerbarang , maka diadakan kegiatan bersama orang tua siswa sebagai bentuk silaturahmi, yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan keakraban dan pemahaman terhadap pentingnya partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Kegiatan-kegiatan keakraban tersebut berupa: kegiatan *Parents Day* di MTS I, pada tanggal 8 September 2012; Pengajian (Studi islam Intensif) setiap hulannya secara rutin dalam peningkatan mutu pendidikan di MTs diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan, perwakilan orang tua siswa yang tergabung dalam POS, dengan nara sumber

Ulama Kabupaten Tegal. Bentuk-bentuk kegiatan seperti ini merupakan bentuk komunikasi kekeluargaan, sebagai sebuah ikhtiar pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh pihak komite dan Yayasan serta madrasah, yang kemudian diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

*Kedelapan*, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan yang diterapkan adalah penilaian berbasis kelas dengan didukung sistem aplikasi komputer.

Delapan standar nasional pendidikan ini telah diwujudkan oleh Lembaga MTs Swasta di Kecamatan Pagerbarang sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi. Upaya ini dilakukan oleh pihak komite dan sekolah untuk mendapatkan partisipasi dari orang tua siswa yang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi tentang pendidikan dan orang tua siswa yang memiliki kecukupan ekonomi. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh mantan kepala madrasah M Faik SH kepala MTs Yaspi Kedungsuguh Pagerbarang: *"Sebagian besar wali murid adalah orang yang punya komitmen terhadap kemajuan putra putrinya, sehingga mereka tidak segan-segan menyumbangkan ide dan materi, demi peningkatan mutu (Faik,2012).* Wujud impian kepala Mts Yaspi Kedungsugih Kec Pagerbarang membangun madrasah berstandar nasional, dengan harapan besar untuk mendapatkan partisipasi masyarakat luas ini pun terwujud. Perwujudan impian ini, dapat ditandai dengan, pada pada tanggal 8-9 September 2010 yang lalu MTs Yaspi Pagerbarang telah

mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Dan ketua tim persiapan akreditasi MTs Yaspi Pagerbarang, yaitu Suyanto. Ketua tim akreditasi ini, menyebutkan bahwa:

*"Akreditasi yang dilakukan di MTs Yaspi Kedungsugih, memiliki tiga fungsi, yaitu (1) penjaminan mutu (quality assurance), hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam hal ini partisipan MTs yang menyekolahkan anaknya di MTs, memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan putra-putrinya yang telah dipercayakan pada MTs; (2) pengendalian mutu (quality improvement), maksudnya adalah agar MTs mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan; (3) pengembangan mutu (quality improvement), akreditasi akan mampu mendorong dan memberi tantangan kepada MTs untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitasnya serta berupaya menyempurnakan berbagai kekurangannya (Dokumen MTs Yaspi, 2012)".*

Begitu juga dengan kepala madrasah dan ketua komite madrasah. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kedua lembaga ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing sesuai *job discriptionnya*. Di samping job, kedua lembaga ini memiliki hubungan yang bersifat koordinatif. Karena garis kebijakan organisasi antara komite madrasah dengan bersifat koorditif, maka kedua lembaga ini memiliki peran yang sama. Kesamaan peran ini, kemudian ada yang menyebutnya dengan mitra kerja. Sebagai mitra kerja, komite madrasah dituntut bekerja sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, begitu juga dengan pihak MTS I. Pada MTS Pagerbarang I, roda organisasi komite madrasah lebih diarahkan dan digerakkan pada aspek-aspek membangun kesadaran masyarakat khususnya orang tua siswa tentang pentingnya berpartisipasi terhadap sekolah, transparansi, akuntabel, dan demokratisasi khusus pada wilayahwilaya pengelolaan keuangan. Setiap

setahun sekali, khususnya pada awal tahun ajaran baru, komite madrasah menyampaikan hal tersebut di atas dan mensosialisasikan program-program sekolah, mana yang menjadi tanggung jawab sekolah dan mana yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa. Dan roda organisasi ini, berjalan efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan pembagian dan uraian tugas yang jelas dari unit terbesar hingga unit terkecil sesuai dengan *job discription* masing-masing. Sebagai guru menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan job yang diamanahkan kepadanya, begitu juga kepala madrasah dan Komite Madrasah, menjalankan fungsi dan tugas sesuai job masing-masing. Semua berjalan sesuai dengan kaidah organisasi MTS kecamatan Pagerbarang I, yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping adanya pembagian tugas yang jelas sesuai job masing-masing seperti tersebut di atas, pada MTS Pagerbarang I juga, terdapat adanya ketertiban koordinasi, harmonisasi organisasi dengan budaya Islami, adanya monitoring dan reorganisasi, ikhlas berkarya, dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk mencapai budaya organisasi MTS Pagerbarang I yang Islami ini, MTS melakukan berbagai kegiatan yang secara khusus membentuk sikap mental dan moral seluruh elemen yang ada dalam organisasi secara rutin. Pendekatan yang digunakan untuk membentuk budaya organisasi Islami ini adalah pendekatan sentuhan spiritualitas. Kepala Madrasah Hamami Kepala Mts IPTEK bahwa:

*"MTS IPTEK Hubul Wathon Pagerbarang menerapkan sistem nilai melalui budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Untuk membentuk budaya*

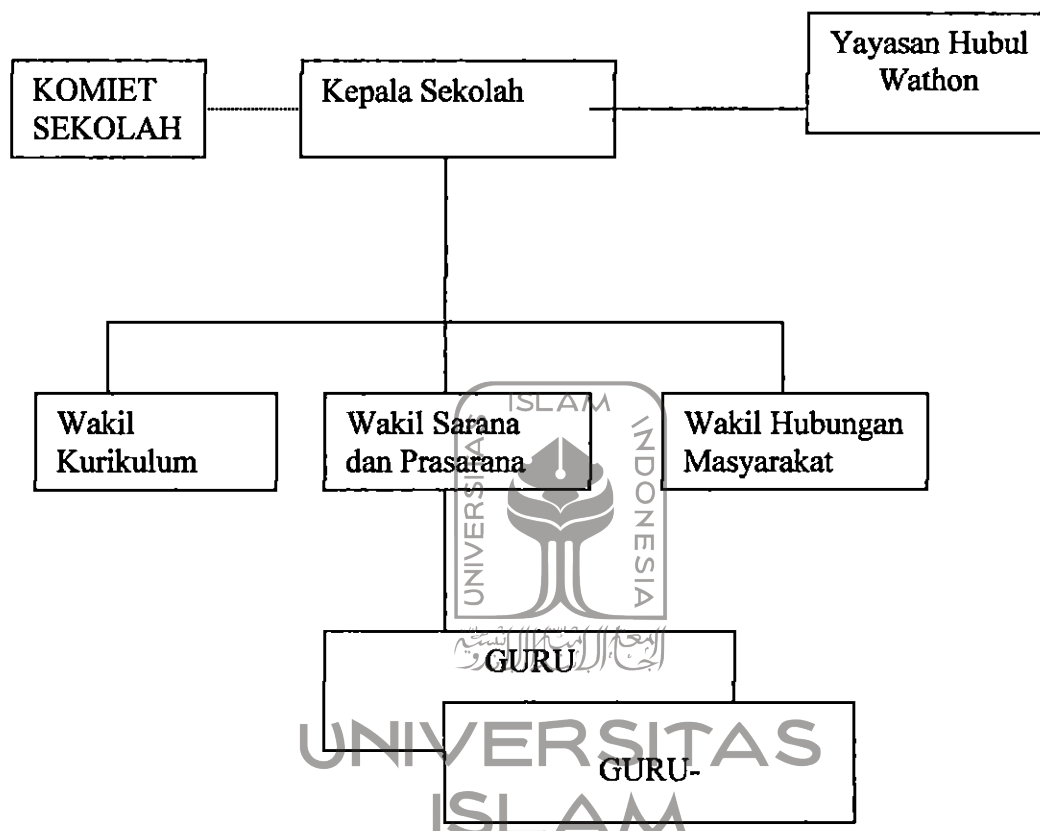
*organisasi Islami pada seluruh warga sekolah, di MTS IPTEK Hubul Wathon Pagerbarang dilakukan pengajian setiap harinya sebelum pelajaran dimulai, melaksanakan sholat Dhuha, Zhuhur, dan sholat Jum'at secara rutin di sekolah (Profile MTS IPTEK Hubul Wathon Pagerbarang, 2012)."*

Agar roda organisasi berjalan efektif dan efisien, MTS IPTEK Hubul Wathon melakukan pembenahan organisasi. Pembenahan organisasi dimulai dengan target pembenahan bidang sarana dan prasarana dalam pelayanan pendidikan. Aspek ini dinilai sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat pada target-target yang ingin dicapai MTS IPTEK Hubul Wathon sebagai berikut:

*"Target sarana dan prasarana pelayanan: (1) terpenuhinya media pembelajaran yang standar; (2) terciptanya lingkungan madrasah yang aman dan nyaman serta mendukung pembelajaran; (3) tersedianya sarana pendukung pembelajaran yang standar; dan (4) tertatanya sistem informasi madrasah yang standar. Target kepegawaian: Meningkatkan kesejahteraan warga madrasah. Tujuan dan target bidang kesiswaan: (1) tercapainya peringkat tiga besar lomba mata pelajaran tingkat nasional, (2) tercapainya prestasi olahraga dan seni tiga besar tingkat propinsi, dan (3) tercapainya ketertiban siswa ketika beribadah di sekolah (Dokumen MTS Pagerbarang, 2012)."*

Ada tiga target yang ingin dicapai MTS IPTEK Hubul Wathon , Mts –Mts yang ada di Kecamatan Pagerbarang yaitu target sarana prasarana pelayanan, yang ini akan berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar; target kepegawaian, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka mendukung profesionalisme kerja; dan target bidang kesiswaan, yang ini akan berhubungan langsung dengan pengguna jasa pendidikan. Struktur

organisasi, sistem kerja, dan garis hubungan organisasi antara Komite Madrasah dengan Kepala Madrasah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.b Struktur dan Hubungan Kepala Sekolah dan Komite MTs IPTEK

Struktur organisasi menunjukkan tentang hubungan organisasi dengan lembaga partisipasi masyarakat. Hubungan kepala sekolah dengan lembaga partisipasi masyarakat bersifat koordinatif. Begitu juga hubungan antara waka I dengan waka II dan waka III. Sementara hubungan dengan masing masing sub unit terkecil memiliki peran dan tugas masing-masing di bawah unit-unit sistem di atasnya bersifat instruktif. Semua sub sistem bekerja sesuai garis komando dan fungsi

tugasnya, ini lah budaya organisasi Berkaitan dengan sistem pengadministrasian dan pertanggungjawaban keuangan, ketua komite, M. Shaleh menuturkan:

*"Komite mempertanggungjawabkan penerimaan uang masyarakat ke masyarakat. Mengenai keuangan, pihak komite dan sekolah ada pertemuan rutin membahas anggaran. Misalnya anggaran untuk pengembangan, anggaran untuk pengeluaran rutin sekolah ini selalu dibahas dalam komite terutama soal keuangan. Misalnya ada guru ngajar sampai sore lapor ke komite, anggaran ini disetujui komite kemudian dikeluarkan. Jadi pihak sekolah mengusulkan ke komite dan komite mengeluarkan anggaran, misalnya sarana prasarana sesuai RAPBS (wawancara, 21,09,2012)."*

## 6. Kepemimpinan Ikhlas dan Beretos Kerja mendorong Partisipasi Masyarakat

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin sangat menentukan dalam membawa misi untuk mewujudkan visi. Visi MTS Pagerbarang yang baik jika tidak didukung visi kepemimpinan kepala madrasah, maka madrasah tersebut tidak berjalan efektif dan efisien. Madrasah akan lumpuh karena ditinggal oleh pemilik madrasah itu sendiri yaitu masyarakat muslim. Fakta menunjukkan bahwa sebelum adanya MTS seperti sekarang banyak masyarakat muslim menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Mts di luar Kabupaten. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa motivasi masyarakat muslim berpartisipasi secara aktif menyekolahkan anaknya di lembaga MTs yang jauh? Persoalan-persoalan seperti inilah yang mendorong perintis MTs Darusalam, Mts Yaspi, MTs Qudussalam, dan MTs IPTEK Hubul Wathon di Kecamatan Pagerbarang bermunculan dengan

melakukan restrukturisasi kepemimpinan untuk merubah wajah MTS menjadi lebih Tren. Model kepemimpinan seperti apakah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas terhadap MTS Pagerbarang? Dan bagaimana pengelola MTs dapat merubah MTS Pagerbarang I dari partisipasi pesimistis menjadi partisipasi optimistis? Apa langkah-langkah yang ditempuh dalam merubah MTS Pagerbarang menjadi sekolah unggul berpartisipasi tinggi? Salah satu motivasi yang mendorong kepemimpinan merubah citra madrasah dari partisipasi rendah ke partisipasi tinggi adalah semangat spiritualitas. Semangat spiritualitas ini, kemudian membangkitkan ruhul jihad Abdul Jalil untuk melakukan perubahan. Ruhul jihad ini menjadi alat dan strategi untuk menggerakkan elemen-elemen lain di MTS Pagerbarang I, seperti guru, karyawan, BP3, orang tua siswa dan masyarakat luas (*stakeholders*).  
menuturkan: *"Bahwa setiap pekerjaan itu ada ruhul jihadnya. Dan ruhul jihad ini selalu kami tekankan kepada mereka, perlunya memiliki jiwa ruhul jihad. Sebab ruhul jihad merupakan sumber energi yang kuat untuk mendorong semangat bekerja dan berkreasi (Dokumen MTS Pagerbarang I, 2012)."*

Apa faktor pemicu munculnya ruhul jihad Kdepala MTs di kecamatan Pagerbarang? Ada dua faktor yang menjadi pemicu munculnya ruhul jihad yaitu pertama, faktor citra madrasah yang rendah, jumud, dan rendah Minat masyarakat Muslim untuk menyekolahkan anaknya; dan kedua, faktor masyarakat Muslim yang elitis menyekolahkan anaknya di sekolah yang jauh dari kota Pagerbarang.

Dinamisasi MTs di Kecamatan Pagerbarang di bawah kepemimpinan Kepala MTs yang muda dan energik dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yang diambil dari kalangan pendidik, telah mewujudkan sekolah dengan memiliki mutu unggul dan memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi. Sekolah yang bermutu unggul dan memiliki partisipasi tinggi dapat dilihat pada tabel indikator keberhasilan MTS ,yang meliputi: prestasi sekolah, perkembangan fisik, kondisi siswa dan guru, perubahan proses pembelajaran, perubahan manajemen dan usaha, dan peningkatan peran serta masyarakat.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini akan memberikan pemaknaan terhadap partisipasi masyarakat dalam wajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang, terutama partisipasi terhadap madrasah Tsanawiyah dan konsep partisipasi masyarakat terhadap madrasah. Penelitian ini bertolak dari suatu pandangan umum bahwa kurangnya partisipasi masyarakat terhadap madrasah kaitannya dengan tuntasnya wajar 9 tahun.

Partisipasi masyarakat terhadap madrasah atau MTS di kecamatan Pagerbarang dapat digolongkan sebagai sekolah yang memiliki kualitas cukup unggul dan memiliki partisipasi yang tinggi. Dalam menjelaskan konsep partisipasi masyarakat dan madrasah, penelitian ini bertolak dari beberapa teori. Ada tiga teori yang digunakan untuk mendekati penelitian ini, yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-*

*fulfilment*), dan pendekatan sosial keagamaan. Tiga pendekatan ini digunakan, dengan maksud untuk memahami dimensi dan konteks sosial gerakan lembaga partisipasi masyarakat dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sekolah. Pendekatan ini ditempuh karena sebagaimana keterlibatan masyarakat terhadap sekolah tidak hanya didorong oleh motivasi situasi sosial tertentu dan keagamaan tertentu, melainkan juga motivasi pemenuhankebutuhan atau investasi masa depan. Sehingga pendekatan ini secara tidak langsung dan secara maksimal akan menjawab tiga rumusan masalah penting, yaitu: pertama, bentuk bentuk lembaga partisipasi masyarakat di MTS Pagerbarang I; kedua, upaya madrasah dan lembaga partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah; dan ketiga, pola dan tahapan kerja madrasah dan lembaga partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sekolah yang memiliki kualitas unggul dan partisipasi tinggi. Pertama: Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Sebuah Strategi Untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah, pihak komite dan madrasah telah melakukan berbagai upaya-upaya dan strategi-strategi. Salah satu upaya dan strategi yang dilakukan adalah membentuk lembaga-lembaga partisipasi masyarakat. Upaya dan strategi ini, telah berhasil membentuk empat lembaga partisipasi masyarakat. Empat lembaga partisipasi masyarakat tersebut, dengan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai sebuah ikhtiar untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Empat lembaga partisipasi masyarakat tersebut, adalah: (1) partisipasi orang tua siswa secara khusus terhimpun dalam lembaga partisipasi orang tua wali, yang disebut dengan Paguyuban Orang Tua Siswa (POS); (2) partisipasi masyarakat luas atau *stakeholders* (pengusaha, masyarakat, orang tua siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikan, politik, LSM, dan lainnya) terhimpun dalam Komite Sekolah/Madrasah (KS/M); (3) partisipasi alumni; dan (4) partisipasi masyarakat dalam bentuk *partnership* atau kerjasama yang mendukung program MTS wilayah kecamatan Pagerbarang yang saling menguntungkan melalui lembaga *public relation* (humas).

Paguyuban Orang Tua Siswa (POS), POS dibentuk sebagai sebuah upaya dan strategi untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan besar. POS merupakan lembaga yang secara khusus menampung seluruh orang tua siswa. Lembaga ini dipilih secara demokratis dan transparan oleh orang tua siswa. Keberadaan lembaga ini terdapat pada setiap kelas. Keberadaan POS sangat membantu peran dan tugas komite sekolah, terutama dalam hal menggalang partisipasi orang tua siswa dalam bentuk materi. POS memiliki peran kunci. Begitu penting dalam memainkan peran dan tugasnya, orang tua siswa lebih mengenal POS dari pada KS/M. Lembaga ini dinilai lebih efektif dan efisien. Wujud nyata partisipasi orang tua siswa terhadap MTS Pagerbarang dapat diidentifikasi ke dalam tiga bentuk yaitu: partisipasi dalam bentuk menyekolahkan putra-putrinyan di MTS Pagerbarang I; partisipasi dalam bentuk finansial, barang, dan jasa; dan partisipasi dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan kritik.

Partisipasi orang tua siswa dalam bentuk menyekolahkan anaknya di MTs , mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditandai sejak peralihan kepemimpinan madrasah dan BP3 di era tahun 2009 dan Angka partisipasi siswa mencapai 90% tahun 2012 bawah kepemimpinan Mts yang masuuh muda-muda.

Di samping itu juga, angka partisipasi siswa dapat dilihat partisipasin minat yang daftar pada MTS . tiap tahunnya pendaftar semakin meningkat sementara formasi sebatas 200 siswa. Angka-angka tersebut, merupakan salah satu indikator, bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan angka partisipasi siswa. Dari angka ini juga menunjukkan bahwa, MTS merupakan sekolah yang memiliki angka partisipasi yang tinggi, terutama dilihat dari aspek partisipasi orang tua siswa dalam bentuk menyekolahkan anaknya di MTS, Begitu besar dan pentingnya figur kepemimpinan untuk mendorong partisipasi, barangkali menjadi faktor pendorong tim peneliti Faisal *et.all.*,

Untuk partisipasi orang tua siswa, dalam bentuk finansial barang, dan jasa, komite dan madrasah menggunakan beberapa strategi untuk mendapatkan partisipasi orang tua siswa dalam bentuk ini. Strategi-strategi tersebut, yaitu partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan "sukarela" atau iuran pendidikan setiap tahunnya; partisipasi finansial dalam amal jariyah setiap anggota POS; partisipasi finansial siswa melalui amal Jum'at, amal Ramadhan, zakat, infaq, dan shadaqah; dan partisipasi dalam bentuk jasa, barang, dan lainnya.

Pada partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan "sukarela" atau iuran pendidikan, pihak komite dan madrasah menggunakan istilah-istilah dengan pendekatan keagamaan. Pendekatan ini digunakan, menurut ketua komite Muhammad Shaleh, untuk menghindari hal-hal yang negatif. Karena kesan di masyarakat, sekolah negeri itu adalah sekolah pemerintah, dan sekolah pemerintah itu harus lebih murah dari sekolah swasta. Ada benarnya pernyataan ketua komite ini. Ini bukan hanya kesan, tapi secara yuridis formal UU Sisdiknas N0.20/2003 telah mengamanahkan pendidikan gratis, bagi pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

Pada pasal 34 ayat 1 UU ditegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjaMTs terselenggaranya wajib belajar Minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Artinya secara yuridis formal anak orang tidak mampu yang berprestasi juga seharusnya menikmati sekolah pemerintah unggul dengan tidak memungut biaya. Sehingga untuk menghilangkan kesan tersebut di atas, digunakanlah istilah-istilah agama misalnya untuk uang masuk siswa baru, digunakan dengan istilah amal jariyah siswa baru. Uang masuk siswa baru disebut sebagai amal jariyah, maka tidak salah kemudian ada orang tua siswa pada tahun ajaran ini, ada yang amal jariyah siswa barunya mencapai 10 juta rupiah. Memang agak kontradiktif, antara istilah yang digunakan dengan substansi makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Ada nada miring dari sebagian kecil orang tua siswa yang

menyatakan bahwa amal jariyah kok wajib. Namun inilah sebuah ijtihad kebijakan yang digunakan dalam rangka membangun kesadaran orang tua siswa untuk lebih banyak memberi. Sehingga teori ideologi dan pendekatan konsep keagamaan menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk menggerakkan dan mendorong orang untuk berpartisipasi. Pada partisipasi finansial dalam bentuk amal jariyah POS, juga dilakukan. Salah satu indikator bahwa POS hanya sebagai sebuah strategi untuk menggalang dana orang tua siswa yang lebih luas dan besar. Di samping perannya sebagai media komunikasi antara orang tua siswa, guru, dan murid, POS juga memiliki sumbangan sukarela (amal jariyah). Amal jariyah ini dilakukan setiap bulan.

Adapun besaran amal jariyah ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat orang tua siswa yang tergabung dalam POS. Berdasarkan hasil keputusan bersama dan bagian dari amal jariyah, hampir tidak ada orang tua siswa merasa keberatan kecuali sebagian kecil. Di samping amal jariyah rutin tiap bulan, melalui POS juga banyak orang tua siswa yang peduli dengan pendidikan dan yang mampu secara ekonomi, secara sukarela menyumbangkan dana, jasa, barang, dan bentuk lainnya untuk kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar. Dan uniknya orang tua yang menyumbangkan berbagai bentuk dana, jasa, dan barang tersebut merasa puas dan senang karena bisa beramal di satu sisi dan di sisi yang lain ini untuk kepentingan anak-anak mereka juga. Data menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi karena berbasis agama dan kesamaan ideologi gerakkan. Masyarakat merasa senang sebagai donatur tetap terhadap sekolah

Muhammadiyah. Dengan dimasukkan sebagai donatur, mereka dapat berinfak. Begitu juga, anggapan masyarakat umum di Amuntai, bahwa masyarakat mau berpartisipasi terhadap sekolah asal untuk kepentingan agama.

Pada partisipasi orang tua siswa dalam bentuk jasa, barang, dan lainnya. Untuk mendapatkan partisipasi finansial dari orang tua siswa dalam bentuk ini, pihak madrasah mendorong dan menggerakkan orang tua siswa untuk berbelanja di koperasi, menggunakan jasa wartel, dana tabungan siswa, dan peminjaman uang di MTS Pagerbarang . Dengan begitu madrasah secara tidak langsung akan mendapatkan partisipasi finansial. Upaya menggalang dana orang tua siswa dalam bentuk ini, dibutuhkan kreatifitas dan strategi kepala madrasah dan ketua komitenya. Tentunya berangkat dari figur kepemimpinannya.

Partisipasi dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan kritik, orang tua siswa menyalurkannya melalui lembaga POS. Ada juga orang tua siswa secara langsung menyampaikan keluhan dan masukan kepada kepala madrasah dan guru wali masing-masing. Orang tua siswa merasakan, hubungan mereka dengan guru dan sekolah lebih terbangun dan komunitif, jika dibanding dengan komite sekolah. Bentuk hubungan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk yang oleh Lane dan Corman (1997), sebagai konsep "*active relationship*", artinya bahwa jaringan hubungan tidak sekedar berpola guru-murid, orang tua-anak, atasan-bawahan, sekolah-orang tua murid dan semacamnya, sebagaimana pada umumnya yang berlaku di

masyarakat, tetapi jaringannya bisa lintas peran dan institusi agar berbagai komponen dalam masyarakat bisa "duduk bersama", saling berhubungan, berkomunikasi secara komunikatif, mendengar, memberi dan menerima, memahami dan berbagi sehingga tercipta ikatan masyarakat yang kuat solidaritasnya, mereka berkembang menjadi semakin saling mempercayai dan menunjang (Faisal, 2007: P.10). Hal ini dilakukan oleh MTS Darussalam, karena MTS YASPI sangat membutuhkan peran serta masyarakat, sementara orang tua siswa juga merasa memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan program MTs IPTEK, sehingga madrasah dan lembaga POS dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan sekolah atau punn kegiatan luar sekolah yang menunjang proses belajar mengajar, selalu melibatkan orang tua siswa.

Bentuk komunikasi harmonis-edukatif dua arah, antara sekolah dengan orang tua siswa, MTS I menggunakan berbagai media komunikasi. Dalam menunjang proses belajar mengajar peserta didik, media komunikasi yang digunakan adalah melalui Kobinsi. Karena madrasah menyadari betul tanpa partisipasi orang tua siswa dan masyarakat luas khususnya dalam menciptakan suasana lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang harmonis-edukatif, pendidikan di sekolah tidak akan pernah berhasil.

Partisipasi Masyarakat dalam Lembaga KS/M, untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat luas agar bergabung dengan lembaga partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah diperlukan berbagai strategi yang tepat. Upaya yang dilakukan agar tepat sasaran dan efektif, maka diperlukan

sinergitas antara apa yang menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan para partisipan. Jika apa yang ditawarkan itu seiring dengan apa yang menjadi motivasi para partisipan, maka para partisipan akan mencari untuk bergabung.

Mengenai kebutuhan partisipan sebagai motivasi, ada tiga hal yang ditawarkan oleh McClelland, seperti yang dikutip oleh Armstrong (1988: P.73) dan Mulyasa (2006: P.123) menyebutkan bahwa kebutuhan yang menjadi motivasi setiap orang adalah ada tiga kebutuhan yaitu: (a) kebutuhan untuk berprestasi: yang disebut sebagai kebutuhan untuk berhasil bersaing; (b) kebutuhan untuk berafiliasi: yang disebut sebagai kebutuhan berhubungan yang hangat dan bersahabat dengan orang-orang lain; dan (c) kebutuhan untuk berkuasa: yang disebut sebagai kebutuhan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Bahwa setiap individu bergabung terhadap suatu organisasi sosial tertentu, akan terdorong atau termotivasi oleh tiga faktor ini, yaitu untuk mendapatkan prestasi. Prestasi yang dimaksudkan dalam konteks ini penghargaan. Karena setiap individu ingin dihargai oleh suatu komunitas dalam lingkungannya. Kemudian setiap individu juga terdorong oleh keinginan untuk bergabung (berafiliasi) dengan masyarakat lain karena faktor persahabatan, kekerabatan, kesukuan, atau bentuk-bentuk primordial lainnya. Kemudian juga setiap individu terdorong oleh kebutuhan ingin berkuasa. Kepentingan politik kekuasaan inilah banyak orang kemudian ingin bergabung pada organisasi sosial, terutama

para politisi kepartaian. Mereka ingin dikenal, karena itu mereka harus bergabung dengan organisasi sosial kemasyarakatan apa pun.

Ada beberapa motivasi yang mendorong kedua tokoh ini mau bergabung dengan dewan pendidikan, yaitu dari aspek akademik, barangkali mereka ingin mengembangkan pokok-pokok pikiran mereka, namun dari aspek politik, mereka juga memiliki agenda-agenda tertentu sesuai dengan latar belakang politik mereka. Mereka bergabung karena mereka ingin dikenal masyarakat luas, mereka juga bergabung karena pengabdian, dan juga mereka bergabung karena mereka ingin menguasai orang lain. Hal ini adalah manusiawi, dan terjadi pada siapa saja. Jadi, ketiga aspek tersebut di atas menjadi catatan penting bagi lembaga partisipasi masyarakat untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat luas. Dengan melibatkan penguasa pada kepengurusan lembaga tersebut, maka akan mampu mendorong masyarakat luas khususnya dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi terhadap sekolah. Para pengusaha akan melakukan partisipasi dalam bentuk apa saja terhadap sekolah, jika yang menggerakkan adalah penguasa, Hal ini dinilai lebih efektif, jika dibanding dengan profesi lainnya untuk menggerakkan masyarakat luas, khususnya masyarakat dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat menengah ke atas.

Bahwa secara konseptual, lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah, lebih memiliki kerangka konseptual yang sistemik dan lengkap, jika dibandingkan dengan lembaga partisipasi masyarakat sebelumnya di MTs Pagerbarang, yaitu BP3 dan lembaga POS. Dua

lembaga ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana komite. Hal ini dapat dilihat dari asas legalitas formalnya. Mulai dari UU Proenas, UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan pembentukannya pun diinterfensi oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Dalam aspek fungsi dan tugas, komite diberikan peran yang lebih besar, jika dibanding dengan BP3 dan POS. Komite memiliki empat fungsi yang tidak dimiliki oleh BP3 dan POS, yaitu memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan, dan mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kegiatannya yang diatur oleh UU, sementara BP3 dan POS tidak memiliki fasilitas khusus dari pemerintah. Meskipun demikian, tampaknya agak sulit untuk dikatakan bahwa lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah ini, memiliki kontribusi lebih besar terhadap peningkatan mutu dan mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sekolah, khususnya di MI dan MTs Swasta dan SD dan SLTP Negeri di Kecamatan Pagerbarang, sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.

Pemerintah tampaknya terlambat menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam bentuk lembaga komite sekolah. Ada beberapa alasan yang mendasari, bahwa keberadaan lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu dan upaya mendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah, dan pemerintah dianggap terlambat, menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, wujud madrasah dan sekolah Pendidikan Dasar 9 tahun dengan kualitas mutu dan partisipasi tinggi, seperti yang tampak sekarang adalah merupakan hasil kerja keras lembaga partisipasi masyarakat dan madrasah sebelumnya. Lembaga partisipasi yang dimaksud adalah BP3, dengan aktifitas bersinergi dengan kepala madrasah /sekolah. Sehingga lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah, yang diterapkan oleh pemerintah belakang ini, dianggap terlambat.

*Kedua*, sudah sekian lama keberadaannya, namun hampir semua orang tua siswa belum merasakan manfaat berarti dari kinerja komite sekolah. Bahkan sebagian besar orang tua siswa menganggap bahwa komite sekolah kurang efektif, dan hingga sampai pada tahap merekomendasikan untuk dibubarkan. Hal ini sebagaimana temuan ICW dan Faisal *et.all*. Kehadiran komite menjadi konflik baru antara kepala sekolah dengan ketua komite. Jika kehadiran komite sekolah, dianggap sebagai lembaga yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun kenapa masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam menyalurkan aspirasinya terhadap

sekolah, mereka cenderung melakukannya melalui lembaga lain, seperti POS, atau pun menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kepala sekolah atau pun kepada guru wali. Dan orang tua siswa merasakan tidak ada beban untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung.

Ketiga, sistem partisipasi masyarakat yang diterapkan di Yayasan atau sekolah swasta telah berjalan dengan baik. Dan sistem ini, keberadaannya jauh sebelum kelahiran komite sekolah. Sehingga siapa pun yang memimpin sekolah atau pun lembaga partisipasi masyarakat, dengan apa pun namanya, partisipasi masyarakat terhadap Wajar 9 tahun, tetap tinggi. Sehingga keberadaan lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah, seperti yang tampak sekarang ini, lebih pada bagaimana menjaga dan mempertahankan sistem yang telah dibangun itu tetap berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, komite dirasakan tidak terlalu bermakna sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keempat, bahwa lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk KS/M pada Wajar 9 tahun baik di MTS maupun di SLTP negeri lebih berperan aktif pada aspek penyadaran dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk partisipasi dalam bentuk kontribusi pemikiran, ide, konsep, dan gagasan tentang pengelolaan dan pengembangan kualitas proses, di MTs Swasta sudah ada sejak tahun 1990-an. Menangani masalah ini dibentuk lembaga khusus yang diberi nama Dewan Pembina Madrasah.

Jika untuk mengukur keberhasilan komite, dilihat dari standar normatif yang ditetapkan pemerintah, maka peran serta komite perlu ditingkat

seoptimal mungkin membantu sekolah untuk mendorong masyarakat luas (masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya sampai jenjang SLTP MTs /SMP) dan menghimbau orang tua yang memiliki ekonomi menengah ke atas, agar berpartisipasi terhadap MTS. Namun dilihat dari aspek substansi komite dan manajemen modern, bahwa komite bermitra dengan sekolah agar sekolah lebih mandiri di dalam pengelolaan sekolahnya dan bahwa setiap sesuatu beban pekerjaan disesuaikan dengan kompetensinya, maka peran dan tugas komite dinilai cukup efektif di dalam memainkan peran dan tugasnya.

Sementara untuk pengelolaan dan proses belajar mengajar di sekolah, diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada kepala sekolah dan guru, karena mereka juga bagian dari anggota komite. Dan untuk inovasi kurikulum dan pengembangan pemikiran pendidikan diserahkan pada badan kehormatan, sekaligus sebagai ketua koordinator majelis madrasah terpadu, yaitu Imam Suprayogo. Ini menunjukkan bahwa MTS Pagerbarang memperhatikan aspek-aspek profesionalisme dalam fungsi dan tugas. Meskipun pihak komite jarang melakukan komunikasi secara kelembagaan antar anggota dalam hal pembagian tugas dan menjalankannya sesuai bidang koordinasi masing-masing pengurus.

#### 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat yang tergabung dalam Partisipasi Alumni SLTP dan MTs di Kecamatan Pagerbarang

Alumni merupakan aset besar dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk berpartisipasi. Karena alumni merupakan hasil (*out put*)

nyata untuk menilai kualitas *in put* dan kualitas prosesnya. Sehingga masyarakat berpartisipasi terhadap MTS Pagerbarang , salah satu indikatornya adalah kualitas alumninya. Jika para alumninya memiliki kualitas yang baik, maka secara tidak langsung akan berdampak pada partisipasi masyarakat. Sehingga salah satu strategi yang digunakan oleh madrasah dan komite untuk mengajak masyarakat agar bergabung dengan MTS Pagerbarang I adalah meningkatkan kualitas *out putnya*, yaitu alumni. Karena alumni merupakan wujud nyata atau bukti prestasi dari hasil kerja madrasah dan komite. Hal ini sangat strategis bagi masyarakat perkotaan, yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.

Bagi mereka pendidikan adalah investasi. Kerena pendidikan itu investasi, maka kelompok masyarakat ini mau bergabung dengan suatu sekolah, aspek pertama kali yang dilihat adalah mutu. Dan mutu tidak bisa dikampanyekan, tapi mutu adalah pengalaman. Partisipasi Melalui Humas Untuk menggalang masyarakat luas agar berpartisipasi terhadap MTS Pagerbarang I, salah satu strategi yang digunakan adalah dengan melalui Humas. Humas adalah sebuah lembaga, yang keberadaannya merupakan bagian dari sekolah. Humas merupakan pintu gerbang bagi MTS Pagerbarang. Karena sebagai pintu gerbang, Humas memiliki peran kunci di dalam membangun citra MTS Pagerbarang dan juga sebagai pusta informasi. Dalam dunia bisnis, Humas dapat digambarkan seperti pemasaran.

Bagaimana masyarakat dapat membeli produk-produk untuk mensukseskan wajar 9 Tahun di Kecamatan Pagerbarang, jika manajemen

kehumasan tidak berjalan dengan baik. Kualitas produk yang dimiliki harus seiring dengan kualitas kehumasan. Kadang-kadang hanya persoalan kecil, yang tidak dijelaskan dengan baik oleh pihak Humas, masyarakat yang mau berpartisipasi menjadi kurang simpatik. Jika ada masyarakat yang kurang simpatik karena persoalan komunikasi, akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Sehingga di sini, peran Humas kemudian menjadi penting.

## 2. Kerjasama Lembaga Pendidikan dengan Pihak Lain

Wujud nyata partisipasi yang diberikan oleh lembaga ini terhadap Wajar 9 Tahun di Kecamatan Pagerbarang adalah membangun kerja sama dengan berbagai pihak; memberikan informasi kepada pihak lain; mendata dan mengakomodasi kunjungan tamu studi banding penelitian dan magang; memelihara hubungan baik dengan lintas sektoral; dan membangun dan membina komunikasi yang harmonis dengan paguyuban orang tua siswa, paguyuban antar jempot sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah.

Pelembagaan Sebuah Strategi Mendorong Partisipasi Komite dan madrasah memainkan peran strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara konstitusi, KS/M belum menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari peran komite yang tidak memberikan pertimbangan terhadap proses belajar mengajar. Namun dilihat dari substansi dan filosofisnya serta aspek manajemen modern terutama pada konsep MBS itu sendiri, komite sekolah telah memainkan peran yang strategis. Peran ini ditandai dengan, untuk menghindari citra

negatif dari orang tua siswa, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh komite, yaitu: (1) pengurus KS/M bekerja secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan bersifat materi, meskipun amanah konstitusi menghendaki; (2) membentuk POS sebagai upaya untuk mendapatkan partisipasi yang lebih besar dari orang tua siswa. Karena sesama orang tua siswa bersama-sama menetapkan besaran partisipasi akan lebih efektif, dan kemungkinan partisipasinya jauh lebih besar dari yang ditentukan oleh komite dan sekolah; (3) KS/M lebih memfokuskan pada memberikan penyadaran, pemahaman, dan pengelolaan dana dari masyarakat secara transparansi, akuntabel, dan demokrasi; (4) kepala sekolah serta guru-guru tidak mengurus masalah keuangan, mereka lebih difokuskan pada pengelolaan proses belajar mengajar secara profesional; (5) komite menyadari bahwa jika komite masuk pada wilayah proses belajar mengajar, berarti komite harus lebih ahli dan faham masalah pendidikan dari kepala sekolah. Karena masalah proses itu domainnya kepala sekolah. Komite percaya sepenuhnya kepada sekolah, karena yang tahu persis kondisi peserta didik adalah guru dan kepala sekolah. Jika komite memberi rekomendasi berarti komite harus lebih ahli dan tahu persoalan dari kepala sekolah dan guru.

Anggapan ketua komite Mts Yaspi kedungsugih M. Shaleh ini cukup beralasan, karena sesuai dengan spirit konsep MBS. Kementerian Pendidikan Nasional memberikan sepuluh alasan penerapan MBS. Diantara lima poin menyebutkan tentang otoritas dan kewenangan sekolah sesuai konsep MBS, yaitu: (1) dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah

maka sekolah akan lebih aktif atau kreatif meningkatkan mutu sekolah; (2) dengan pemberian fleksibilitas atau keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah; (3) sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya; (4) sekolah lebih mengetahui lembaganya, khususnya *input* pendidikan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik; (5) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Berangkat dari dasar pemikiran ini, perlu di pertegas kembali tentang otoritas dan wewenang komite dan sekolah. Jika komite tetap difungsikan, maka ruang geraknya tidak harus masuk pada wilayah yang bukan domainnya. Komite dirahkan untuk berperan pada menumbuhkan kesadaran, pemahaman, kepada masyarakat tentang menggunakan hak-hak dan kewajibannya berpartisipasi terhadap sekolah. Sebagaimana amanah konstitusi bahwa masyarakat berkewajiban berpartisipasi, tapi masyarakat juga diadvokasi terhadap hak-haknya bila terdapat penyimpang kebijakan sekolah.

Upaya-upaya mendorong masyarakat berpartisipasi masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi

membutuhkan banyak energi dan strategi yang tepat agar masyarakat mau bergabung untuk berpartisipasi terhadap sekolah yang dimaksud. Karena yang digerakkan dan didorong untuk berpartisipasi terhadap sekolah adalah masyarakat perkotaan, dan salah satu ciri masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang sudah sadar tentang pentingnya dunia pendidikan. Pendidikan bagi kelompok masyarakat seperti ini adalah investasi. Karena pendidikan itu investasi, maka kelompok masyarakat ini sangat selektif di dalam menentukan dan memilih sekolah mana yang harus mereka berpartisipasi. Di samping itu juga, ciri masyarakat perkotaan yang lain adalah masyarakat yang rasional-individualistik, yaitu suatu masyarakat yang berbuat sesuatu berdasarkan pertimbangan rasional untuk memenuhi kebutuhan individunya, masyarakat yang mau bergabung terhadap suatu organisasi sosial karena organisasi sosial tersebut memenuhi kebutuhan dirinya. Maka untuk menggerakkan kelompok masyarakat model ini adalah tidak hanya menggunakan pendekatan ideologi dan pendekatan spiritual (pendekatan keagamaan) semata, tapi juga harus dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Diantara pendekatan lain tersebut adalah pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*). Karena menurut kelompok masyarakat model ini, semangat kejuangan dan spiritual saja tidak cukup, tapi juga perlu mutu kompetitif. Hal ini seperti dalam teori McClelland. Ia menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan yang menjadi motivasi setiap orang adalah kebutuhan untuk berprestasi. Artinya bahwa mereka menyekolahkan anak mereka di MTs maupun di SMP, karena mereka

mengharapkan dan menginginkan anak mereka akan mendapatkan berprestasi dikemudian hari. Sehingga mutu kemudian menjadi pilihan utama bagi masyarakat model ini. Dengan mutu kompetitif, ideologi dan agama menjadi pilihan alternatif. Sebagai contoh, masyarakat Muslim sebelum adanya MTS seperti sekarang ini, mereka menyekolahkan anak-anaknya di SMP. Agama dan ideologi menjadi tidak penting, tatkala tawaran keduanya menjadi tidak kontekstual sesuai kebutuhan zamannya. Jika sekolah/madrasah ingin mendapatkan partisipasi dari model masyarakat tipe ini, setidaknya MTs harus memahami apa yang menjadi motivasi dan harapan mereka. Hal ini dapat digambarkan, bahwa Mts /SLTP diibaratkan sebuah produk. Agar masyarakat dapat membeli produknya, selalu melakukan pembenahan untuk meningkatkan mutu produknya. Jika mutunya berkualitas dan diiringi dengan publikasi atau promosi yang seimbang, maka MTs/SMP akan mendapatkan partisipasi dari masyarakat model ini. Dan ini terjadi hubungan timbal balik. Menurut Michael Armstrong, hubungan motivasi dan prestasi kerja adalah sesuatu yang positif. Artinya bahwa untuk meningkatkan motivasi masyarakat terhadap sekolah, maka akan melahirkan lebih banyak usaha dan prestasi kerja sekolah yang lebih baik, sebagai upaya untuk mempertahankan mutu dan jaminan mutu.

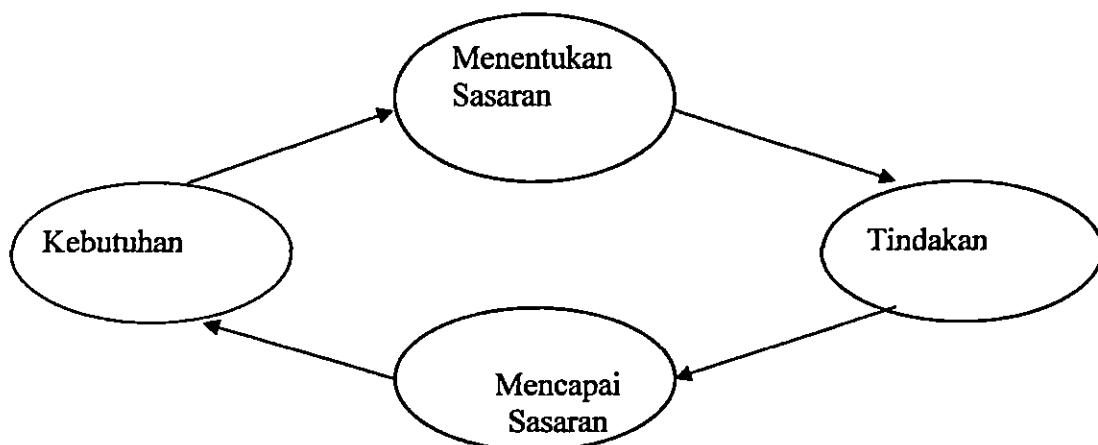
Keberhasilan Pendidikan Wajar 9 tahun berawal dari bentuk partisipasi orang tua menyekolahkan anak-anaknya kemudian bermotivasi ingin mendapatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat juga ingin berpartisipasi tapi dengan adanya jaminan mutu. Sehingga dengan demikian hubungan

antara MTS dengan masyarakat tidak serta merta begitu saja terbangun. Akan tetapi melalui sebuah proses. Proses yang dimaksud adalah proses motivasi, karena setiap aktivitas tergantung pada motivasinya.

Jika sekolah memiliki kualitas yang baik, akan tetapi tanpa proses komunikasi yang baik, maka ada saja hambatan-hambatan dalam proses partisipasi. Proses ini oleh Michael Amrstrong (1988:P.70) disebut dengan proses motivasi. Proses motivasi dimulai oleh seseorang mengenali secara sadar atau tidak suatu kebutuhan atas dirinya. Kemudian menentukan sasaran dan melakukan tindakan untuk mencapai sasaran. Setelah mencapai sasaran maka kebutuhan terpenuhi. Proses ini menurut Amrstrong, dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 7.1 Hubungan Antara Motivasi dan Prestasi Kerja mendorong partisipasi



Gambar 4.c Proses Motivasi

Proses motivasi pada gambar 4.c, dipengaruhi oleh dua hal yaitu: (a) pengalaman. Masyarakat berpartisipasi menyekolahkan anaknya di sekolah, mereka belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu mereka atau pengalaman orang lain terutama pada kualitas *out put* (alumninya). Jika alumninya menunjukkan adanya mutu yang baik, maka masyarakat akan bergabung dan tingkat partisipasi pun meningkat, begitu juga sebaliknya. Hal ini juga berlaku bagi partisipasi masyarakat dalam bentuk yang lainnya. Bagi masyarakat yang mau menyumbangkan pemikirannya, juga sangat tergantung pengalaman masa lalu mereka dengan pihak komite dan sekolah tersebut. Jika pengalaman masa lalunya terjadi komunikasi yang baik, maka akan meningkat partisipasi dalam bentuk ini; (b) harapan, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap sekolah, dimana sekolah tersebut mereka bergabung. Harapan ini pun, bisa didasari oleh pengalaman masa lalu, bisa juga keyakinan yang kuat bahwa MTs Pagerbarang sebagai sekolah berbasis agama mampu merubah mental putra-putrinya. Jika harapan ini tidak jadi kenyataan, maka masyarakat secara sadar pula hijrah ke sekolah lain yang dianggap memberi harapannya.

Indikator tentang berhasilnya lembaga partisipasi masyarakat dan sekolah menyadarkan dan mendorong orang tua siswa berpartisipasi terhadap sekolah, dapat ditandai dengan beberapa alasan, diantaranya adalah: *pertama*, dapat dilihat dari banyaknya lulusan SD yang masuk melanjutkan ke SMP dan MTs tinggi. Hal ini dikatakan tingkat partisipasi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP/MTS kecamatan Pagerbarang tinggi; *kedua*,

orang tua siswa melalui putra putrinya secara suka rela menginfakkan biaya-biaya di luar biaya pendidikan; *ketiga*, di samping menginfakkan finansial melalui putra putri mereka, orang tua siswa juga melakukan hal sama, baik dalam bentuk finansial, barang, dan jasa terhadap SMP/MTS di kecamatan Pagerbarang agar suksesnya Wajar 9 Tahun; dan *keempat*, relanya orang tua siswa membayar biaya pendidikan yang cukup tinggi meskipun MTS di Kecamatan Pagerbarang adalah sekolah swasta.

Di samping peran ideologi sebagai gerakan sosial, agama juga memiliki peran yang *determinant* (menentukan) dan terbukti efektif untuk mendorong setiap individu berpartisipasi terhadap sekolah. Karena dalam ajaran agama, terdapat konsep tentang *fastabikūl khairāt* (berlomba-lomba dalam kebajikan) (Qs. Al-Baqarah (2): 148); *ta'āwun* (tolong menolong) (Qs. Al-Mā'idah (5): 2); bekerja *ikhlas* (tanpa pamrih), watawā shaūbisshobri watawā shaūbil marhamah (berpesan untuk bersabar dan kasih sayang) (Qs. Al Balad (90):17); hidup *berjama'ah* (berorganisasi), dan bentuk-bentuk lainnya.

Secara garis besar, ada dua pendekatan yang digunakan lembaga partisipasi masyarakat dan madrasah untuk menggerakkan dan mendorong partisipasi dalam suksesnya Wajar 9 Tahun khususnya MTs swasta dalam masyarakat, yaitu: Islam sebagai ruh dan spirit gerakan; dan kualitas mutu yang kompetitif atau adanya jaminan mutu sebagai daya tawar. Dua pendekatan ini yang digunakan MTs untuk mewujudkan citat-citanya sebagai sekolah bermutu unggul dan berpartisipasi tinggi.

Islam sebagai ruh dan spirit menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sekolah, tampaknya cukup efektif. Dari berbagai hasil temuan menunjukkan hal tersebut di atas. Konsep ini, dalam teori gerakan sosial, oleh Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Syamsul Arifin (2005:388) disebut dengan gerakan ideologis. Jika suatu gerakan sosial tidak ditopang oleh ideologi, maka akan menghadapi ketidak pastian yang berkepanjangan. MTs menyadari betul terhadap kedudukan ideologi ini. Sehingga dalam rumusan konsep landasan filosofis gerakan untuk mewujudkan madrasah berstandar nasional yang handal dan Islami.

Secara filosofis, madrasah memiliki landasan epistemologi Islam yang kuat. Artinya lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam kurikulumnya, dibangun atas konsep ilmu Qur'ani, yaitu konsep ilmu yang memiliki nilai-nilai wahyu yang digali dari ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Epistemologi ilmu yang dibangun tidak hanya *rasionalitas-aqliyah*, tapi juga aspek *spiritual-rūhiyah*, atau juga disebut dengan penguasaan IPTEK dan IMTAQ. Aspek ini memberi pengaruh besar terhadap masyarakat untuk berpartisipasi. Dari landasan filosofis ini, MTS Pagerbarang I telah merubah Minimal dua citra madrasah. *Pertama*, citra pendidikan Islam dikotomis. MTs di Kecamatan hadir sebagai wujud aspirasi masyarakat agar sukses dalam wajar 9 tahun dengan dua wajah atau model pendidikan Islam yang tidak membedapisahkan (*dikotomis*) antara ilmu agama dan ilmu umum, sebagaimana pemahaman kebanyakan umat Islam. *Kedua*, menepis citra madrasah termarginalkan, jumud, dan berbagai bentuk padanan istilah

lainnya, menjadi sekolah unggul dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa, Islam sebagai landasan filosofis gerakan, tampaknya menjadi aspek fundamental yang menentukan bagi partisipasi masyarakat terhadap Wajar 9 tahun.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang berbeda beda ada yang paham dengan wajib belajar 9 tahun, cukup paham dan kurang paham. Masyarakat kecamatan Pagerbarang ada yang beranggapan wajib belajar 9 tahun memberatkan rakyat, dan ada yang beranggapan tidak memberatkan rakyat. Dari hasil wawancara dirangkum bahwa persepsi masyarakat pagerbarang terhadap wajar 9 tahun menyambut dengan baik akan kebijakan pemerintah tersebut, apalagi tuntutan zaman yang semakin modern sehingga masyarakat perlu lebih cerdas lagi.
2. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang, menyekolahkan anak ke MTs / SMP, memberikan sumbangan dana kegiatan pendidikan melalui Komite sekolah guna pemenuhan sarana dan prasarana sekolah/madrasah, Memberikan shodakoh dan infak melalui kegiatan Paguyuban Orang tua siswa (POS), ikatan Alumni sekolah / Madrasah, dan memberikan sumbang saran terhadap pendidikan di MTs maupun SMP. Temuan menunjukkan bahwa di Kecamatan Pagerbarang, bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah diwadahi dalam empat lembaga partisipasi, yaitu: (1) partisipasi masyarakat luas atau *stakeholders* (pengusaha, masyarakat, orang tua

siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikan, politik, LSM, dan lainnya) terhimpun dalam Komite Sekolah/Madrasah (KS/M). Untuk komite dibagi dua, yaitu: Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan Kehormatan (BK). BPH lebih fokus pada persoalan membantu kepala sekolah bersama-sama mengelola keuangan sekolah yang transparan, akuntabel dan demokratis, dan menyadarkan masyarakat pentingnya berpartisipasi. Sementara badan kehormatan KS/M, kontribusinya lebih pada pengembangan pemikiran kurikulum, proses, dan pemberdayaan SDM; (2) partisipasi orang tua siswa secara khusus terhimpun dalam lembaga partisipasi orang tua wali yang disebut dengan Paguyuban Orang Tua Siswa (POS). Lembaga ini secara khusus dibentuk oleh komite dan sekolah sebagai upaya dan strategi untuk menghilangkan citra negatif komite, yang kesannya hanya juru tagih sekolah dan melegitimasi kebijakan kepala sekolah. Sehingga POS dinilai sangat efektif untuk menggalang dana, jasa, barang, dan bentuk materi lainnya dari orang tua siswa; (3) partisipasi alumni. Wujud konkrit partisipasi ini di samping materi, tapi juga lebih ditekankan pada publikasi dan pencitraan (*boulding image*); dan (4) partisipasi masyarakat dalam bentuk patnership atau kerjasama yang mendukung program MTs IPTEK, MTs Darusalam, MTs Yaspi, dan MTs Al Qudusussalam Mulyoharjo yang saling menguntungkan melalui *public relation* (humas). Wujud partisipasi ini ditekankan pada aspek membangun relasi dan komunikasi kepada semua pihak yang berkepentingan untuk kemajuan bersama yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Sedangkan partisipasi masyarakat

Pagerbarang terhadap SMP negeri lebih menunjukkan berupa bantuan dana pembangunan dan uang sekolah.

3. Sikap masyarakat terhadap wajib belajar 9 tahun di kecamatan Pagerbarang mendukung dengan baik dengan dilandasi rasa iman dan amal shaleh, karena dukungan terhadap pendidikan merupakan bentuk investasi akhirat yang membuahkan keridoan Allah swt.

#### **B. Saran–Saran**

Saran yang perlu disampaikan adalah :

1. Masyarakat kecamatan Pagerbarang agar lebih meningkatkan partisipasinya terhadap pendidikan baik SD/MI atau SMP/MTs terutama lembaga pendidikan Islam Swasta yang membutuhkan dana guna peningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang.
2. Para pengusaha, hartawan dan dermawan agar senantiasa memberikan infak kepada guru-guru MTs Swasta yang gajinya dibawah standar sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam memajukan Mts di Masa mendatang.
3. Pemerintah Kabupaten Tegal dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal hendaklah memperhatikan sarana dan prasarana lembaga pendidikan MI dan Mts Swasta yang telah berjasa dalam mensukseskan pendidikan Wajib belajar 9 tahun sesuai dengan program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2006. Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Arifin, Imron, 2000. *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs dan Multi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Makalah Penelitian Kualitatif bagi Dosen PTAI se-Kopertais Wilayah IV, Unisma, Malang, 2000.
- Azwar, Azrul, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- Ahmad Fauzi, 2004. *Tesis Studi Kinerja Komite Sekolah di MTsN Blitar*, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Armstrong, Michel, 1990. *Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa: Cikmat et.al., PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1990.
- A.S. Piet, 1999. *Dimensi Administrasi Pendidikan*, Surabaya, Tanpa Tahun. Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernitas Menuju Milenium Baru*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Danim, Sudarwan, 2003, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. *Pedoman Komite Sekolah*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Profil Pendidikan Kota Malang 2007/2008*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Deep, San dan Sussman Lyle, 1996. *Seri Pustaka Nomor 23, Mengefektifkan Kinerja: Sarana untuk Menghadapi Empat Puluh Empat Jenis Orang yang Menimbulkan Masalah di Lingkungan Kerja*,

- Penerjemah, Arif Suyoko, PT. Pustaka Binama Pressindo, Cetakan ke dua, Yakarta, 1996.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly, 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Fadjar, Malik , 2005. *Holistik Pemikiran Pendidikan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
- , 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, LP3NI, Jakarta, 1998.
- , 2006. *Makalah dalam Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*, UIN-Malang Press, Malang, 2006.
- Faisal, Sanapiyah et.all., 2007. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*, UM Press, Malang, 2007.
- Fatah, Nanang, 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- , 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cetakan ke Tujuh, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Gaspersz, Vincent, 1998. *Manajemen Produktivitas Total: Strategi Peningkatan Produktivitas Bisnis Global*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Gibson, James L. et.al., 1993. *Organisasi; Perilaku, Struktur dan Proses*, Jilid I, Edisi V, Alih Bahasa Djarkasin, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Hidayat, Comaruddin, 1995. dalam *Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi*, Editor M.Yunan et.all, PP. Muhammadiyah & Lembaga Pengkajian dan Pengembangan, Jakarta, 1995.
- <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/03/18/00370441>.
- Ibrahim, Djamil M., 1997. *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia Abad 21*, Editor, Dawam Rahardjo, PT. Intermedia, Cetakan Pertama, Jakarta: 1997.
- Idrus,M,2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm 145

- Irawan, Ade, et.all., 2004. *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004.
- , 2006. *Buruk Wajah Pendidikan Dasar: Riset Kepuasan Warga Atas Pelayanan Pendidikan Dasar di Jakarta, Garut, dan Solo*, Cetakan Pertama, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2006.
- Kasiram, Moh., 2006. *Makalah dalam Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*, UIN-Malang Press, Malang, 2006.
- Komisi Nasional Pendidikan, 2001. *Menuju Pendidikan Bermutu dan Merata*, Jakarta: Laporan Komisi Nasional Pendidikan, 2001.
- Langgulung, Hasan, 1999. *Asas-Asas Pendidikan Islam, Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Mamik, Sri Istuti, 2002. *Inovasi Madrasah, Studi Kasus di MAN 3 Kota Malang tahun 2002*, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Maslow, Abraham H., 1994. *Seri Manajemen Nomor 104 A, Motivasi dan Kepribadian*
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta, UI-Press.
- Millet, John D., 1959. *Manajemen in The Public Service*, McGraw Hil Book Company Ins., New York,
- Moleong, Lexy J., 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan ke Dua Puluh Dua, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- , 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum Hingga Redevinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung, Nuansah.
- , 2004. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung, PT. Rosda Karya.
- Mulyasa, 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cetakan ke Sepuluh, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

- Nazir, Moh., 2005. *Metode Penelitian*, Editor Riska Agustine & Risman FS, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nurkholis, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta, Grasindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Jakarta, 2007.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional (SNP)*, Jakarta, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang *Standar Nasional Pendidikan (NSP)*, Bandung, Citra Umbara.
- Poniman, Farid (et.all), *Kubik Leadership: Solusi Esensial Meraih Sukses dan Kemuliaan Hidup*, Hikmah, Jakarta, 2006.
- Purwanto, M., Ngalim, 2006. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cetakan keEnam Belas, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- Qomar, Mujamil, 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, Jakarta, Erlangga
- Raharjo, 2002, *Madrasah sebagai The Centre of Excellence*, dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Sekolah Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2004. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milinium III*, Yogyakarta: AdiCita
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Persada Raya.

Winardi. 2002. *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Lampiran : 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama Yang diwawancarai : .....

Umur : ..... tahun

Pekerjaan :

Jabatan : Komite Sekolah

Alamat :

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang wajib belajar 9 tahun?
2. Darimana Anda mengetahui tentang wajib belajar 9 tahun?
3. Apakah Anda ikutserta mensukseskan wajib belajar 9 tahun?
4. Bentuk-bentuk apa yang diberikan masyarakat dalam mensukseskan wajar 9 tahun?
5. Meskipun pendidikan gratis dari SD sampai SMP, bagaimana tanggapan Anda bila sekolah mengadakan pungutan untuk melengkapi saran sekolah?
6. Apakah Anda berkenan jika dimintai sumbangan untuk pembangunan sekolah?
7. Sebagai komite sekolah apakah Anda memberi masukan kepada sekolah untuk kemajuan pendidikan?
8. Apakah saudara memikirkan sarana dan prasarana sekolah yang belum lengkap?

Lampiran : 2

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama Yang diwawancarai : .....

Umur : ..... tahun

Pekerjaan :

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat :

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang wajib belajar 9 tahun?
2. Apakah masyarakat /wali murid ikut berpartisipasi suksesnya wajar 9 tahun?
3. Apakah Anda mendorong masyarakat ikutserta mensukseskan wajib belajar 9 tahun?
4. Bentuk-bentuk apa yang diberikan masyarakat dalam mensukseskan wajar 9 tahun?
5. Meskipun pendidikan gratis dari SD sampai SMP, bagaimana tanggapan Anda bila sekolah mengadakan pungutan untuk melengkapi sarana sekolah?



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA